



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA
KOMISI XI DPR RI**

- Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : I
Rapat ke- :
Jenis Rapat : Rapat Kerja
- Dengan : 1. Menteri PPN/Kepala Bappenas;
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
3. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).;
5. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).
- Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Kamis, 29 Agustus 2019
Waktu : 16.00 WIB s.d 22.05 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi XI DPR RI Gedung Nusntara I
Ketua Rapat : Ir. H. Soepriyatno
Sekretaris Rapat : Drs. Urip Soedjarwono
Acara : Pembahasan RKAKL Tahun 2020
- Hadir Pemerintah : 1. MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS **BAMBANG BRODJONEGORO**;
2. SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) **BAHTIAR ARIF**;
3. KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) **Dr. ARDAN ADIPERDANA, Ak., MBA., CA, CFA**;
4. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) **RONI DWI SUSANTO**;
5. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) **DR. SUHARIYANTO**.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Ir. H. SOEPRIYATNO/F-P. GERINDRA):

Assalamualaikum Wr. Wb.

Selamat Malam dan Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yth. Saudara Menteri PPN/Kepala BAPPENAS beserta jajarannya;

Yth. Saudara Setjen BPK RI beserta jajarannya;

Yth. Saudara Kepala BPKP beserta jajarannya;

Yth. Saudara Kepala LKPP beserta jajarannya;

Yth. Saudara Kepala BPS beserta jajarannya;

Yth. Para Anggota Komisi XI DPR RI;

Hadirin yang berbahagia.

Menurut catatan yang kami terima sekretariat, daftar hadir telah ditandatangani oleh ... orang dari 51 anggota Komisi XI DPR RI yang terdiri atas ... Fraksi dari 10 fraksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, ijinilah kami membuka Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dan dinyatakan terbuka untuk umum.

RAPAT DIBUKA PUKUL 19.00 WIB

Para hadirin yang terhormat,

Mengawali Rapat hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya kita dapat menghadiri acara Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Saudara Menteri PPN/Kepala Bappenas, Setjen BPK RI, Kepala BPKP, Kepala LKPP, dan Kepala BPS dalam keadaan sehat wal'afiat. Semoga hal-hal yang akan kita bicarakan dan simpulkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Agenda Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI pada hari ini adalah pembahasan mengenai pagu anggaran Kementerian PPN/Bappenas, BPK RI, BPKP, LKPP dan BPS dalam rangka pembicaraan RAPBN tahun anggaran 2020.

Sebagaimana kita ketahui, Pemerintah telah menyampaikan dokumen nota keuangan dan Rancangan Undang-Undang APBN tahun 2020 pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2019. Adapun alokasi belanja RKAKL Kementerian PPN/Bappenas, Setjen BPK RI, BPKP, LKPP dan BPS ada sebagai berikut.

1. Alokasi pagu anggaran Kementerian PPN/Bappenas, sebesar Rp1.848.700.000.000,-
2. Alokasi pagu anggaran Setjen BPK RI sebesar Rp3.537.700.000.000,-

3. Alokasi pagu anggaran BPKP sebesar Rp1.861.000.000.000,-
4. Alokasi pagu anggaran LKPP sebesar Rp169.700.000.000,-
5. Alokasi pagu anggaran BPS sebesar Rp7.968.800.000.000,-

Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dulu, kemudian Setjen BPK RI, Kepala BPKP, Kepala LKPP dan Kepala BPS untuk menyampaikan paparannya.

Singkat-singkat saja ya Pak.

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat Bapak Pimpinan dan Ibu, Bapak Anggota Komisi XI DPR RI.

Perkenalkan kami menyampaikan RKAKL untuk Kementerian PPN/Bappenas tahun anggaran 2020. Mungkin langsung pada halaman 4. Fungsi dari Bappenas atau tugas dan fungsi dari Bappenas berdasarkan dua dasar hukum, yaitu Perpres 65 Tahun 2015 dan Perpres 66 yang dirubah menjadi Perpres Nomor 20 Tahun 2016. Dengan fungsi, yaitu menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, menyelenggarakan pemantauan evaluasi dan pembangunan nasional, serta mendukung perencanaan pembangunan nasional.

Kami ingin menyampaikan kinerja dari penyerapan anggaran kami di tahun 2018, di mana anggaran tahun 2018 yang waktu itu sudah disepakati adalah Rp3 triliun lebih di mana kami menyerap sekitar 81,47% dan 92% di program perencanaan, di 91,5% di program dukungan manajemen serta 97% program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur.

Khusus peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang 6,23% tidak terserap karena perubahan skema kantor Bappenas di Jalan Rasuna Said, yang tadinya dari pengakhiran sewa berubah menjadi mekanisme sewa, sehingga akhirnya ada 18,53% pada waktu itu yang tidak bisa diserap.

Kemudian capaian akuntabilitas kinerja kami untuk 2015-2018, kami sudah 11 kali WTP sejak tahun 2008. Kemudian evaluasi akuntabilitas kinerja sudah pada grade A dengan skor 80,08 di tahun 2018 meningkat dari BB sebelumnya. Kemudian penyerapan anggaran seperti kami sampaikan tadi memang menurun ke 81 dari 97% tetapi di karenakan tadi mekanisme khusus perubahan dari penghentian sewa menjadi menyewa penuh.

Kemudian katagori nilai reformasi birokrasi kami juga sudah berubah dari BB sekarang menjadi A atau memuaskan. Di tahun 2019 ini yang sedang berjalan, kita ada 3 kegiatan utama, program utama. Yang utama adalah program perencanaan pembangunan nasional, di mana kami sudah melakukan kegiatan seperti Indonesia Development Channel, Kajian Ibu Kota Negara, Musrenbang RKP tahun 2020, sosialisasi visi 2045, demikian juga rancangan awal RPJMN yang kami sudah

keliling ke 5 wilayah dari 6 wilayah. Kemudian juga penyusunan RKP tahun 2021 dan evaluasi kinerja pembangunan daerah serta mempersiapkan untuk Musrenbang nasional RPJMN 2020-2024.

Di bidang dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas, sesuai dengan yang kami sampaikan tadi. Kami saat ini sedang melakukan penataan Gedung Kantor Kementerian PPN/Bappenas yang baru, artinya sebagai tambahan dari yang Taman Suropati, yaitu di jalan Rasuna serta dalam proses juga kami untuk mengadakan data center.

Untuk program pengawasan peningkatan akuntabilitas aparatur, kami mengembangkan sistem e-audit dan pengawasan kinerja. Sampai tanggal 27 Agustus 2019, penyerapan anggaran kami masih di bawah perkiraan yang kami perkirakan bisa mencapai hampir 60% saat ini baru terserap 44%, karena ada beberapa yang belum realisasi pembayaran meskipun sudah ada kegiatan seperti penataan Gedung Kantor Jalan Rasuna, kemudian pengembangan data senter, kemudian pengembangan bagian dari e-government atau SPBE, serta satu data Indonesia yang juga sudah keluar Perpresnya.

Untuk tahun depan Rencana Kerja dan Anggaran kami tahun 2020 tetap dengan 3 program tadi. Yang pertama, untuk program perencanaan pembangunan nasional kegiatan atau prioritasnya adalah pertama perencanaan dan penganggaran, model inovasi, dan fasilitasi percepatan pembangunan, yaitu menyelesaikan RPJMN 2020-2024, memulai kajian untuk RPJPN 2025-2045, penyusunan RKP 2021 serta dukungan pelaksanaan SPBE terutama untuk pengembangan big data dan satu data Indonesia.

Demikian juga kami akan melakukan piloting dan skalling up model inovasi pembangunan yang sudah ada, seperti kemitraan prisma untuk pertanian, pembanguna rendah karbon, dan model pembangunan daerah. Terobosan lainnya yaitu fasilitasi pembangunan, baik untuk PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran), kerja sama Pemerintah Badan Usaha, mendorong atau membentuk development channel, komite vokasi, dan analisis kemiskinan.

Kemudian program prioritas kedua, yaitu pengurangan kesenjangan wilayah. Melalui perencanaan pembangunan kota baru, wilayah metropolitan dan pusat-pusat pertumbuhan, baik kawasan industry, ekonomi khusus, maupun kawasan strategis pariwisata nasional. Yang ketiga adalah koordinasi mengenai pemindahan ibu kota negara, baik dalam bentuk penyiapan regulasi, yaitu penyiapan Rancangan Undang-Undangnya, Peraturan Pemerintah, Pemerintah Presiden, maupun juga menyusun yang namanya kajian lingkungan hidup strategis untuk mendukung master plan yang nantinya akan menjadi kegiatan utama dari pemindahan ibu kota di tahun 2020.

Kemudian untuk perencanaannya sendiri kami akan menyiapkan master plan, menyusun grand desain atau visioning. Kemudian kajian pemberdayaan ekonomi lokal, penguatan institusi, pelestarian budaya, serta kajian mendalam, pemetaan sumber daya di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan. Kajian strategi komunikasi, kemudian konsolidasi dari seluruh kajian yang sudah dilakukan, tentu juga kita harus melakukan koordinasi lintas Kementerian Lembaga dengan para akademisi.

Diluar 3 prioritas tersebut, kami juga akan melakukan kegiatan terkait dengan perencanaan, yaitu operasional dari komite nasional keuangan syariah. Kemudian memfasilitasi sustainable development goals, memperkuat kemampuan perencanaan Pemerintah Daerah melalui iklan, kemudian studio perencanaan wilayah serta asistensi untuk penyusunan RPJMP. Yang lainnya adalah pengembangan manajemen talenta sumber daya manusia Indonesia, komite transformasi digital, rencana aksi nasional geopark, dan persiapan hibah millennium chalange corporation yang tahap kedua dari Amerika Serikat.

Kemudian untuk program yang lainnya untuk pendukung, baik dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, yaitu untuk penyelenggaraan event, seperti Musrenbang, Indonesia Development Forum dan juga untuk SDG's summit. Yang lainnya ada penguatan teknologi informasi komunikasi, rehabilitasi Gedung Kantor Bappenas yang di Senopati yang sifatnya heritage serta telaahan Peraturan Perundang-Undangan terkait sinkronisasi perencanaan penganggaran. Untuk pengawasan dan peningkatan akuntabilitas apatur tetap dilanjutkan, termasuk mengembangkan sistem elektronik audit.

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak sekalian.

Pagu anggaran tahun 2020 Bappenas, seperti yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan sebesar Rp1,8 triliun terdiri dari:

1. Rupiah Murni sebesar Rp1,649
2. Pinjaman sebesar Rp141 miliar
3. Dan hibah sebesar Rp38 miliar.

Dengan program utama dapat kami ulangi lagi, untuk perencanaan pembangunan nasional sebesar Rp948 miliar, program pendukung Rp870 miliar, serta pengawasan peningkatan akuntabilitas aparatur sebesar Rp10 miliar.

Demikian gambaran atau *highlight* dari Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga, Kementerian PPN/Bappenas 2020.

Terima kasih, kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Lanjut ke Setjen BPK RI.

SETJEN BPK RI:

Bismillahirrahmanirahim.

**Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi XI DPR RI beserta Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI,
Yang kami hormati Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kepala LKPP,
Kepala BPKP, dan Kepala BPS,**

Serta hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-tama ijin kami menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Sekjen kebetulan mendapat tugas ke Latvia. Dan untuk itu kami ditunjuk Wakil Ketua BPK untuk mewakili acara Rapat Dengar Pendapat ini.

Ijin kami untuk memaparkan Rencana Kerja Anggaran BPK tahun 2020. Kami langsung ke slide 3, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, tugas dan wewenang yang diemban oleh BPK adalah, yang pertama adalah memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Yang kedua adalah menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara kepada lembaga perwakilan dalam hal ini DPR, DPD, DPRD, sesuai dengan kewenangannya, serta menyerahkan pula kepada Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota. Yang ketiga adalah melaporkan unsur pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan kepada instansi yang berwenang. Yang keempat adalah memantau pelaksanaan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan dan memberitahukannya secara tertulis kepada DPR RI, DPD dan DPRD serta Pemerintah.

Kemudian visi dan misi, dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara serta dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, BPK menyusun sebuah rencana strategis di mana rencana strategis ini digunakan sebagai rencana 5 tahunan BPK untuk mencapai visi dan melakukan misi dengan tujuan dan sasaran strategis.

Untuk periode Renstra 2016-2020, visi BPK adalah menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Dan selanjutnya dengan visi tersebut ada dua misi yang diemban, yang pertama adalah memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara secara bebas dan mandiri dan yang kedua adalah melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independent dan professional.

Dalam memastikan tercapainya visi dan misi tersebut, BPK merumuskan tujuan dan strategis yang didukung dengan kebijakan strategis pencapaiannya melalui rumusan sasaran strategis. Dan gambaran secara umum adalah sesuai dengan yang ada di slide.

Kemudian slide selanjutnya adalah gambaran mengenai manfaat hasil pemeriksaan BPK tahun 2016 sampai dengan 2018. Di mana dari dalam hal laporan realisasi hasil pemeriksaan yang dihasilkan ini dari tahun 2016 sampai dengan semester I tahun 2019 tergambar di slide yang paling atas kiri. 2016 itu ada 1.739 kemudian sampai dengan semester I tahun 2019 ini hanya satu semester itu sudah mencapai 1.206. Jadi kalau diharapkan nanti hampir dua kali lipatnya kalau untuk angka satu tahun.

Kemudian terkait dengan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Pusat dari tahun 2016 sampai dengan 2018 juga sudah menunjukkan

kenaikan opini. Jadi sejak tahun 2016 opini WTP ini di Pemerintah Pusat ada 94% dari 74 Kementerian/Lembaga dan di tahun 2019 ada 82. Untuk Pemerintah Daerah sendiri juga demikian, dari 378 Pemerintah Daerah yang memperoleh WTP di tahun 2016 mencapai 443 di tahun 2019. Demikian juga terkait dengan kasus-kasus hasil pemeriksaan investigasi perhitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli.

Selanjutnya di slide ini memaparkan karena ada kewajiban bagi kita untuk memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Ini ada gambaran tindak lanjut selama periode 2016 sampai dengan 2018.

Capaian kinerja BPK untuk tahun 2016 sampai dengan 2018. Jadi seperti dijelaskan pada slide 4 terkait dengan Renstra BPK. Untuk mendukung pencapaian tujuan strategis, BPK menetapkan dua sasaran strategis. Yang pertama, tingkat keberhasilan sasaran strategis yang diukur melalui dua indikator kinerja utama. Yang pertama, tingkat relevansi pemeriksaan dengan harapan pemangku kepentingan dan yang kedua adalah presentasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Sementara hasil untuk sasaran strategis dua, diukur melalui tingkat indikator kinerja utama, yaitu presentasi laporan hasil pemeriksaan yang digugat dan BPK dinyatakan menang. Indeks kepuasan audit atas kinerja pemeriksaan BPK, Indeks mengukur organisasi BPK, nilai *quality assurance* reformasi birokrasi dan nilai akuntabilitas kinerja.

Adapun perkembangan capaian kinerja utama Pemerintah tahun 2016-2018 tergambar di slide. Yang utama adalah bahwa selama 3 tahun terakhir BPK juga untuk reformasi birokrasi juga sudah mendapatkan nilai A. Kemudian nilai akuntabilitas kinerja juga A, dan opini BPK yang diperiksa oleh KAP juga selama ini juga mendapatkan opini WTP.

Selanjutnya terkait dengan evaluasi kinerja anggaran BPK semester I tahun 2019.

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota Komisi XI DPR RI yang terhormat.

Capaian semester I untuk anggaran 2019, berdasarkan penilaian Kementerian Keuangan kinerja BPK sampai dengan semester I ada dua yang dinilai. Jadi ada indikator kinerja pelaksanaan anggaran itu mendapatkan nilai sebesar 95,23. Kemudian evaluasi kinerja anggaran ini mendapatkan anggaran 58,40 atau berada pada tingkat 4 nasional untuk pengukuran evaluasi kinerja.

Kemudian terkait dengan pagu dan realisasi anggaran BPK, untuk tahun 2017, 2018 dan 2019 ini tergambar di slide yang di depan. Jadi untuk tahun 2017 dari anggaran 2,8 direalisasikan 95% atau nilainya Rp2,67 triliun dan di tahun 2019 ini pada 19 Agustus ini dari Rp3.799 miliar telah terealisasikan Rp2.280 miliar atau 60,04%. Ini adalah peringkat 12 dari 86 KL dari sisi penyerapan anggaran.

Capain BPK lainnya ini terkait dengan capaian yang sudah didapatkan BPK selama 2018, yang pertama ada procurement award dari Kementerian Keuangan, obsession award sebagai *best achievement in state institution*, kemudian

penghargaan dengan predikat sangat baik atas prestasi dalam evaluasi sistem Pemerintahan berbasis elektronik tahun 2018. Penghargaan pada public relation Indonesian award 2018, kemudian wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tenggara. Kemudian ada penghargaan anugerah Humas Indonesia tahun 2019 katagori terpopuler di media online, tentunya terpopuler dari hal yang positif. Kemudian capaian internasional ini juga sudah kami sering sampaikan.

Kemudian lanjut ke pagu anggaran BPK tahun 2020. Sesuai dengan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tentang pagu anggaran Kementerian/Lembaga dan penyelesaian RKAKL 2020. Pagu anggaran BPK adalah sebesar Rp3.538.000.000.000,-. Pagu anggaran BPK ini mengalami kenaikan sebesar Rp200 miliar dibandingkan dengan pagu indikatif di awal tahun 2020. Ini terbagi dalam dua program, program yang pertama adalah program dukungan manajemen mendapatkan alokasi 19% atau nilainya Rp657 miliar. Dan program pemeriksaan keuangan negara 81% atau nilainya Rp2,88 triliun.

Kemudian pagu anggaran kalau kita bandingkan pagu anggaran 2020 vs pagu anggaran 2019, ini pagu anggaran 2020 masih lebih rendah sebesar Rp261 miliar dibandingkan dengan pagu tahun anggaran 2019. Penurunan pagu anggaran tersebut berdampak stagnan atau menurunnya tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Pemerintah dan kepuasan audit di atas kinerja BPK, sehingga mohon nanti Pimpinan dapat bisa menambahkan kembali.

Kemudian terkait dengan rencana kegiatan BPK tahun 2020. RKAKL BPK terbagi menjadi 2 program dan kedua program ini mempunyai keterkaitan yang erat dan sangat mendukung tugas dan fungsi BPK. Berikut rencana kegiatan BPK yang akan dilaksanakan ini ada slide. Pagu anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya BPK yang teralokasikan Rp657 miliar atau 18,58% akan digunakan diantaranya adalah untuk yang pertama adalah peningkatan komunikasi antara BPK dan pemangku kepentingan dan kerja sama internasional sebesar Rp115 miliar. Kemudian peningkatan dukungan teknologi informasi yang terintegrasi. Ketiga, peningkatan pengelolaan sumber daya manusia melalui sistem ... (suara tidak jelas) peningkatan efektifitas pengelolaan sarana dan prasarana. Dan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.

Sedangkan untuk program pemeriksaan, pagu anggaran untuk program pemeriksaan keuangan negara sebesar Rp2,8 triliun atau 81,42% dari keseluruhan pagu. Digunakan yang pertama adalah tentunya untuk pemeriksaan BPK berdasarkan tema dan fokus pemeriksaan BPK sebesar 2,757 di mana kami tema dan fokusnya adalah mengikuti sesuai dengan prioritas pembangunan yang ada di RPJMN.

Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan pengawasan terintegrasi. Yang ketiga adalah peningkatan layanan legislasi pengembangan dan bantuan hukum serta layanan konsultasi hukum dan kepanitraan. Dan yang keempat adalah peningkatan kapasitas dan kapabilitas Diklat pemeriksaan keuangan negara. Dan

yang kelima adalah penyusunan perencanaan dan penelitian dan pengembangan sebesar terakhir dengan alokasi 0,44%.

Terkait dengan kronologis susulan anggaran BPK.

Pimpinan dan Bapak, Ibu Anggota Dewan yang kami hormati.

Yang tersaji di slide adalah kronologis upaya BPK dalam mendapatkan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan BPK tahun 2020. Sejak awal tahun BPK secara konsisten mengusulkan kebutuhan sebesar Rp4,397 triliun kepada Pemerintah dan pada Rapat Dengar Pendapat Pagu Indikatif tanggal 19 Juni 2019. Bapak dan Ibu Anggota Dewan juga memahami kebutuhan anggaran tersebut. Dan kami harapkan untuk hari ini juga demikian.

Pimpinan dan Bapak, Ibu Anggota Dewan yang kami hormati.

Kenaikan pagu anggaran sebesar Rp200 miliar dibandingkan dengan pagu indikatif yang kemarin. Itu akan dialokasikan untuk peningkatan jumlah dan kualitas LHP BPK terutama untuk penambahan volume LHP dan kegiatan lainnya antara lain untuk peningkatan kapasitas badan Diklat, sertifikasi pemeriksa, dan peningkatan quality assurance dan quality control. Yang kedua adalah peningkatan sarana dan prasarana untuk penggantian dan pemenuhan peralatan pemeriksaan, untuk memenuhi keseimbangan dengan jumlah pemeriksaannya terutama dalam peralatan notebook dan peningkatan aplikasi pemeriksaan. Kemudian peningkatan tata kelola organisasi yang antara lain digunakan untuk peningkatan kualitas pengembangan dan bantuan hukum dan pertimbangan BPK atas standar akuntansi Pemerintahan dan sistem pengendalian intern Pemerintah. Kemudian peningkatan hubungan dengan pemangku kepentingan dan kerja sama internasional, antara lain untuk implementasi pemeriksaan EIA dan pelaksanaan sosialisasi, seminar, FGD dengan pemangku kepentingan.

Kemudian berdasarkan pagu anggaran BPK tahun 2020 yang belum sepenuhnya bisa untuk digunakan membiayai seluruh perencanaan tahun 2020. Untuk itu BPK juga mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp860 miliar. Usulan anggaran ini konsisten dengan kebutuhan BPK yang sudah disampaikan sejak awal tahun bahwa kebutuhan anggaran kita adalah 4,375. Dan usulan tambahan ini akan digunakan untuk peningkatan jumlah dan kualitas LHP BPK, sebagian besar untuk itu. Kemudian peningkatan kapasitas dan kapabilitas Badan Diklat yang memang baru menjadi eselon I. Kemudian peningkatan teknologi informasi, peningkatan sarana dan prasarana penunjang pemeriksaan, antara lain untuk penguatan pemeriksaan investigative. Dan peningkatan tata kelola organisasi yang professional. Dan penambahan pada pagu anggaran 2020 sesuai yang diusulkan Rp860 miliar diharapkan dapat berdampak terhadap peningkatan pengendalian mutu pemeriksaan BPK.

Demikian kami mohon dukungan Pimpinan dan Anggota Dewan untuk dapat menyetujui segala perencanaan kami.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Lanjut Kepala BPKP.

KEPALA BPKP:

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat malam.

Yang kami hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi XI DPR RI.

Perkenankan kami menyampaikan paparan berkaitan dengan tugas dan fungsi BPKP dan kemudian desain prioritas kegiatan pengawasan 2020. Realisasi anggaran dan output tahun 2019, kemudian pagu anggaran dan target output tahun 2020 serta hasil pengawasan 2019.

Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional. Sedangkan fungsinya, yang pertama melakukan pengawasan internal terhadap akuntabilitas keuangan negara, meliputi kegiatan lintas sectoral, kegiatan kebendaharaan umum negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Yang kedua, melakukan review atas laporan keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden. Yang ketiga, meningkatkan kapabilitas atau kapasitas pengawasan intern. Yang keempat, melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Adapun desain prioritas kegiatan pengawasan tahun 2020, mengacu kepada indikator kinerja utama BPKP sebelumnya, yaitu peningkatan aktifitas SPIP, peningkatan kapabilitas APIP, serta peningkatan indeks akuntabilitas program prioritas pembangunan nasional. Kemudian di fokuskan kepada pengawalan pembangunan nasional, peningkatan ruang fiskal, pengamanan aset negara atau daerah dan peningkatan governance system.

Kemudian dari fokus atau strategis pengawasan itu, kemudian berdasarkan urgencynya di prioritaskan kepada mandat peraturan perundang-undangan, instruksi dan arahan Presiden dan penugasan Pemerintah lainnya. Dan dari prioritas itu sebetulnya dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu dalam konteks assurance dan advisering.

5 prioritas nasional antara lain pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, dan infrastruktur dan pemerataan wilayah, nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja. Yang keempat adalah ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, stabilitas pertahanan dan keamanan.

Adapun anggaran dan output tahun 2019 dapat kami sampaikan bahwa per 27 Agustus 2019 total realisasi anggaran sebesar Rp1.029 miliar atau 65% dari total anggaran 2019 yang rinciannya seperti disajikan dalam slide. Target dan realisasi output tahun 2019 sampai dengan 27 Agustus 2019 sudah terealisasi 54,49% yang rinciannya seperti disampaikan pada slide. Dan capaian tersebut masih kurang dari 60% karena ada beberapa hal yang masih dalam proses penyelesaian.

Sedangkan pagu anggaran dan target output tahun 2020, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S557 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B437 tanggal 22 Juli 2019 tentang pagu anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2020 dan hasil penelaahan trilateral meeting Bappenas, Kementerian Keuangan dan BPKP tanggal 1 Agustus 2019, dapat kami sampaikan bahwa pagu anggaran sebesar total Rp1.000.891.998.834,- terdiri dari kode program atau jenis belanja 01 sebesar Rp1.440.061.096,- dan kode program jenis belanja 06 sebesar Rp414.907.738,-

Pagu anggaran tahun 2020 rinciannya disajikan pada slide, dipaparkan di depan. Sedangkan perbandingan target output tahun 2019 dan 2020 total target tahun 2020 sebesar 12.710 satuan atau naik 32,7% yang dirinciannya disajikan pada slide di depan. Adapun hasil pengawasan yang telah dicapai oleh BPKP selama ini terkait dengan pengawalan pembangunan nasional khususnya berkaitan dengan proyek strategis nasional dan program prioritas nasional dengan berbagai *item*-nya seperti dipaparkan di slide di depan.

Sedangkan penghematan pengeluaran dan optimalisasi penerimaan negara telah dicapai untuk tahun 2019 berkaitan dengan penghematan pengeluaran negara dari hasil audit maupun tugas-tugas lainnya sebesar Rp5.211 miliar. Sedangkan optimalisasi penerimaan negara selama tahun 2019 sampai dengan 27 Agustus 2019 sebesar Rp227,06 miliar. Sedangkan kontribusi terhadap keseluruhan anggaran negara tahun 2019 sampai dengan 27 Agustus 2019 sebesar Rp5,4 triliun.

Demikian juga pada slide berikutnya tersajikan kontribusi BPKP terhadap penyelematan keuangan negara yang berasal dari audit investigative atas permintaan aparat penegak hukum, audit perhitungan keuangan negara dan audit investigative atas permintaan instansi lainnya.

Kinerja implementasi versi II sudah bisa diimplementasikan sekitar 90,73%. Dan sebarannya disajikan dalam slide di depan. Demikian juga penerapan sistem pengendalian intern Pemerintah sudah dicapai target-target seperti disajikan pada slide di depan. Demikian juga untuk penguatan kapasitas aparatur pengawasan intern Pemerintah. Sedangkan untuk peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan kinerja disajikan pada slide di depan. Sebagian besar dari laporan keuangan Pemerintah Pusat atau Daerah sudah meningkat kualitas opini dari BPK.

Demikian paparan kami.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Yang potensi sudah, inikan potensinya Rp162,8 miliar dan US Dolar 2,25 juta ini baru potensi Pak, belum kembali, belum diselamatkan. Potensi penyelamatan keuangan negara, halaman 18. Inikan berasal dari audit investigative permintaan APH, kemudian audit BKKR, kemudian audit investigative permintaan instansi, berarti ini baru potensi ya.

KEPALA BPKP:

Potensi ini berdasarkan hasil laporannya, realisasinya, itu tergantung dari penyeteroran ke kas negara.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak.
Lanjut ke Kepala LKPP.

KEPALA LKPP:

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati,
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kepala BPKP, Sekretariat Jenderal BPK dan
Kepala BPS.**

Ijinkan kami menyampaikan paparan tidak seluruhnya yang sudah kami siapkan. Dan kami akan fokus kepada tugas dan fungsi LKPP kami lewati saja. Ke profil anggaran LKPP di slide 6, lanjut.

Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati.

Dari 2015 sebagai baseline penetapan pagu anggaran 2020, alokasi anggaran LKPP mengalami perubahan dari Rp297 miliar di tahun 2015 dengan penyerapan Rp261 miliar. Dan di tahun 2018 sebesar Rp224 miliar dengan penyerapan 91%. Dan di tahun ini dengan alokasi anggaran Rp213 miliar sampai dengan per 26 Agustus 2019 sudah tercapai 62% atau Rp132 miliar.

Kami sampaikan capaian kinerja LKPP, kita perhatikan profil pengadaan nasional. Nilai belanja APBN kita Rp2.220 miliar di tahun 2018 dan di tahun 2019 sebesar Rp2.461 miliar. Dan ada jumlah paket pengadaan yang cukup besar sekitar 3 juta 188 juta paket pengadaan. Ini data per tanggal 26 Agustus 2019. Dari nilai belanja tersebut, next slide. Hampir 50% itu memerlukan pengadaan barang dan jasa sebesar 1.040 triliun, 39,6%. Dan yang melalui transaksi elektronik e-procurement 412 triliun. Dari Rp412 triliun tersebut dengan melalui e-tendering 87% sebesar Rp359 triliun melalui e-procurement melalui katalog Rp53 triliun atau 13% dari total belanja barang dan jasa di 2018.

Kami sajikan akumulasi optimalisasi anggaran negara lebih dari Rp150 triliun yang tercatat dalam sistem e-procurement. Ini hasil dari selisih antara pagu anggaran dengan hasil lelang atau kita sebut penghematan selama 4 tahun berhasil di hemat sebesar Rp150 triliun.

Lanjut, salah satu fungsi LKPP adalah terkait dengan hukum dan penyelesaian sengketa. Kami membutuhkan pengembangan layanan penyelesaian sengketa, kami telah melakukan, melayani 9.220 layanan advokasi terkait dengan pengadaan, 1.093 terkait dengan permasalahan kontrak pengadaan barang dan jasa. Dan kami melayani 383 kasus terkait pelayanan pemberian keterangan ahli dari target 100 kasus. Dan kami melakukan supervisi pendampingan di Asean Games dan Para Games tahun 2018 dan pendampingan kotak suara Pemilu 2019 dan bisa menghemat sekitar 50% dari alokasi anggaran di KPU dalam rangka pengadaan pelaksanaan Pemilu 2019.

F-PKS (H. ECKY AWAL MUHARAM):

Pimpinan, interupsi sedikit.
Ini 2018, 2019 atau akumulasi?

KEPALA LKPP:

Akumulasi Bapak.

F-PKS (H. ECKY AWAL MUHARAM):

Nah, ini harusnya dijelaskan karena kita tren, kalau gitu kan akan nambah terus pasti. Kita akan jadi *misleading information* Pak. Inikan pembahasan Rencana Kerja Anggaran, tentu semua harus katanya tadi *money follow programme* kita bagaimana bisa menganalisis ketika tidak ada tren pembagian antara capaian per tahun dan anggaran yang diperlukan. Kalau tadi pakai akumulasi semua kinerjanya itu yang paling hemat Bappenas ya. Jadi fokus saja kalau mau ya per tahun dijelaskan, ini *misleading*.

Terima kasih.

KEPALA LKPP:

Lanjut, ini per tahun opini BPK kita WTP tahun 2015, WDP di tahun 2016, WTP di tahun 2017 dan tahun 2018 kembali ke WTP. Dan nilai RB-nya saat ini tahun 2018 kami di nilai A.

Lanjut, penghargaan yang kami capai di tahun 2018 adalah nilai tertinggi katagori lembaga dengan nilai 103,7 untuk zona hijau untuk predikat kepatuhan ombudsman. Predikat menuju informative untuk peringkat I, untuk kualifikasi menuju informative katagori lembaga negara tahun 2018 dan pengelola pegawai terbaik BKN award tahun 2018 untuk katagori LPNK. Penghargaan dari asosiasi dan

terakhir kami mendapatkan insentif atas kinerja tahun anggaran 2018 dengan katagori Kementerian/Lembaga dengan pagu anggaran kecil yang mendapatkan tambahan anggaran 30 miliar dari Kementerian Keuangan di tahun 2019.

Lanjut, rumusan visi ini kami sesuaikan saja dengan RPJMN dan RKP tahun 2020, lanjut saja. Visi LKPP kami adalah menjadi lembaga pengadaan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional sesuai dengan RPJM dari Bapak Presiden nantinya. Misinya adalah mengembangkan kebijakan dan strategi pengadaan yang bersinergitas ekosistem pengadan, membangun kognitif procurement sistem yang selaras dengan ...(suara tidak jelas) terbaik dunia, meningkatkan SDM pengadaan yang professional dan kelembagaan yang kredible.

Lanjut, prioritas LKPP penguatan regulasi, karena memang tugas dan fungsi kami adalah menyusun kebijakan dan pengembangan strategi terkait dengan pengadaan barang dan jasa Pemerintah, melalui monitoring evaluasi PBJ, penguatan reagulasi dan pemdampingan PBJ, penguatan regulasi dan pendampingan PBJ di desa, penguatan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha dan mendorong pengadaan yang berkelanjutan.

Yang kedua, prioritas LKPP adalah pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa. Terkait dengan integrase sistem pengadaan barang dan jasa, penguatan sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), pengembangan katalog lokal dan sektoral, pengembangan monitoring evaluasi kinerja pengadaan, peningkatan kualitas penyedia pekerja, baik pengembangan big data dan peningkatan standart LPSE.

Lanjut, penguatan SDM juga menjadi salah satu tugas dari LKPP. Kami harus meningkatkan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa) menjadi level 3 atau proaktif, mendorong keterisisan jabatan fungsional pengelola pengadaan, meningkatkan peran agen pengadaan, kompetensi jabatan fungsional pengelola pengadaan dan non jabatan fungsional pengelola pengadaan.

Untuk tugas hukum dan penyelesaian senggah, kami punya prioritas untuk menciptakan *Proivity Asesor* di beberapa daerah di Indonesia, mendorong penyelesaian hukum, konsolidasi pengadaan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa Pemerintah, mengembangkan layanan penyelesaian sengketa pengadaan dan terakhir adalah penguatan internal LKPP, meningkatkan kapasitas pegawai LKPP, meningkatkan sarana dan prasarana LKPP dan penguatan kelembagaan LKPP, termasuk reorganisasi LKPP.

Lanjut, pagu anggaran tahun 2020. Ini sesuai dengan surat bersama Menteri Keuangan dan Kementerian Bappenas Rp169.675.434.000,- Lanjut, pada saat Rapat Dengar Pendapat tanggal 19 Juni 2019 kami mengusulkan tambahan anggaran yang pada waktu itu sudah disetujui oleh Komisi XI DPR RI kami ucapkan terima kasih. Di tahun 2018 anggaran LKPP Rp224 miliar dengan penyerapan 91%. Tahun 2019 anggaran LKPP turun menjadi 213 akan tetapi LKPP mendapatkan insentif atas capaian kinerjanya sebesar Rp30 miliar. Realisasi sampai saat ini 26 Agustus 2019 sebesar 62%.

Pada tahun 2020 berdasarkan pagu anggaran yang disampaikan dan hasil dari kami bertemu dengan DPR RI 19 Juni, 22 Juli keluar pagu anggaran yang

masih sama dengan pagu indikatif Rp169.675.000.000,- turun 20,4% dari tahun anggaran 2019, sehingga kami mengusulkan pada saat itu 19 Juni 2019 di Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI dan disepakati tambahannya ada Rp116.707.000.000,- sehingga kami mengusulkan kenaikan di pagu definitive nanti bisa menjadi Rp286.382.000.466,- atau naik 34,4% dari tahun anggaran 2019.

Lanjut, usulan tersebut akan kami gunakan untuk dukungan pada 20 proyek prioritas nasional yang nilai pagunya 10 miliar, yaitu pendampingan, konsolidasi dan peningkatan layanan, penguatan PBJ di desa 9,4 miliar ini untuk menyusun standar dan pedoman teknis pengadaan di desa. Kemudian penyusunan standar dan pedoman teknis KPBU dan pendampingan 4 proyek KPBU sebagai alternative pembiayaan Pemerintah sebesar Rp3,8 miliar. Ini kita bandingkan dengan keterangannya adalah untuk mendampingi alokasi anggaran cukup besar untuk pengolahan sampah sebesar dengan nilai investasi Rp3,5 triliun, dan penerangan jalan umum kota Surakarta, peningkatan nilai investasi, pengembangan bandara udara Singkawang dengan nilai investasi Rp1,3 triliun dan sistem penyediaan air minum Pekanbaru dengan nilai investasi Rp750 miliar.

Yang keempat untuk penguatan sistem infrastruktur IT pengadaan nasional dengan nilai 54,5 miliar ini peremajaan infrastruktur dan sistem untuk internal maupun eksternal LKPP dan terakhir untuk penguatan kelembagaan internal LKPP sebesar 38,4 miliar dengan kegiatan untuk penyempurnaan struktur organisasi LKPP, peningkatan kapasitas SDM LKPP, sarana dan prasarana kerja termasuk redesain layout ruangan kerja, sehingga total yang kami usulkan tambahan sebesar Rp116.707.032.000,-

Demikian Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati, yang dapat kami sampaikan. Mohon dukungan untuk penetapan di pagu definitive, kami bisa mendapatkan alokasi tambahan sebesar Rp116.707.032.000,- sehingga alokasi anggaran LKPP di tahun 2020 di dalam pagu definitrive bisa menjadi Rp286,3 miliar.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Lanjut Kepala BPS.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Bapak Pimpinan, Bapak Wakil Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada BPS untuk memaparkan Rencana Kerja Tahun 2020. Kalau diizinkan Bapak untuk menyingkat waktu saya akan langsung konsentrasi kepada anggaran tahun 2020 di slide 10. Di

slide 10 Bappenas sudah menentukan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020. Di sana sudah ditetapkan 5 prioritas nasional, karena itu seluruh kegiatan BPS akan digunakan untuk mendukung prioritas nasional.

Jadi BPS sudah membuat matrik seperti bisa dilihat di slide berikutnya, ini hanya ringkasan saja, misalnya untuk mendukung prioritas nasional nomor satu, pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Selain kegiatan rutin seperti Susnas dan Sakernas kita akan melakukan kegiatan besar Sensus Pemerintah tahun 2020.

Kemudian misalnya di prioritas nomor tiga, untuk mendukung data nilai tambah ekonomi sektor riil dan sebagainya. Kita akan membuat data baru mengenai neraca untuk tourism, kemudian juga passenger exit survey dimana dari survey ini kita akan bisa melihat rata-rata pengeluaran dari wisatawan mancanegara dan sebagainya. Kemudian untuk ketahanan pangan, kita bekerja sama dengan BIPT menggunakan satelit untuk menghitung produksi tanaman pangan.

Jadi matrik ini sudah kita susun, saya ingin meng-highlight mengenai pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 2020 di slide berikutnya. Perlu saya informasikan bahwa di tahun 2020 Indonesia beserta 53 negara lainnya akan melakukan Sensus Penduduk dan perumahan. Untuk pertama kalinya dalam Sensus Penduduk ini BPS akan bekerja sama dengan Kemendagri, di mana sebagai basis data kita akan menggunakan data Dukcapil. Dengan menggunakan basis ini nanti tahapan Sensus Penduduk kali ini akan berbeda dengan tahapan Sensus Penduduk di tahun 2010.

Tahap pertama dengan menggunakan basis dari Dukcapil, kita akan melakukan Sensus Penduduk online pada bulan Maret 2020. Kita akan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk memperbaiki atau mengupdate datanya lewat HP-nya masing-masing dengan menggunakan ...(suara tidak jelas) Kemudian ketika masyarakat belum berpartisipasi penuh nanti petugas kita akan mendatangi dengan menggunakan tablet dan juga kuisisioner biasa pada bulan Juli 2020.

Banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh dari data Sensus Penduduk tahun 2020 ini. Kalau sekarang kita sering membicarakan demografi atau penduduk lansia itu semua adalah contoh pemanfaatan hasil Sensus Penduduk 2020 untuk membuat proyeksi sampai dengan tahun 2045 dan seterusnya.

Dengan adanya kegiatan besar Sensus Penduduk Tahun 2020 ini, maka pagu anggaran yang diajukan oleh BPS semula adalah Rp7.928 miliar dan penyesuaian karena ada koreksi mengenai PNBPN sehingga angka terakhirnya adalah Rp7.928 miliar. Di mana dari total tersebut PNBPN-nya ada sekitar Rp 23.000.000.867,-

Kalau kita lihat kegiatan yang menyita banyak anggaran BPS, 62% memang untuk penyediaan dan pelayanan informasi statistik. Dan dari sana bisa dilihat bahwa porsi terbesarnya di halaman 17 adalah untuk Sensus Penduduk 2020 yang menelan biaya sekitar Rp4 triliun atau sekitar 81% dari total anggaran untuk penyediaan data BPS. Sementara untuk penyediaan data yang mendukung prioritas lainnya relative kecil.

Besarnya anggaran untuk Sensus Penduduk ini karena 9,86% dari total anggaran sebesar Rp4 triliun akan digunakan untuk kegiatan lapangan. Di mana akan melibatkan jumlah petugas yang lumayan besar, yaitu sekitar 318 ribu petugas. Nanti pada awal Januari kita akan membuka lowongan untuk mereka yang tertarik untuk melakukan pendataan dalam Sensus Penduduk 2020. Perlu saya informasikan bahwa saat ini jumlah RT yang ada di Indonesia adalah sekitar 1,2 juta dan secara rata-rata nanti satu petugas akan bertugas di 5 RT.

Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai Rencana Kerja BPS tahun 2020. Saya mohon dukungan dari Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI, supaya Rencana Kerja yang sudah disusun BPS bisa berjalan lancar.

Demikian Bapak, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kita langsung melakukan pendalaman ya Pak.
Dari sebelah kanan dulu Bapak Achmad Hatari.

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang terhormat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya mulai dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Bapak Menteri, WTP-nya 11 kali luar biasa ini. penyerapan 2011 baik ya hampir 90%, kinerja penyerapan tahun 2019 Bapak Menteri posisi tanggal 27 Agustus 2019 masih dibawah 50% atau 43,82 tapi kira-kira masih 4 bulan ke depan Bapak Menteri optimis ini bisa lebih penyerapannya bisa meningkat lagi. Yang lain-lain tadi oke, kegiatan program perencanaan pembangunan, sarana dan prasarana ini sudah selalu kita bahas. Jadi saya pikir untuk Bappenas oke. Dari Fraksi Partai Nasdem tidak ada masalah realistis ini, cukup baik.

Berikutnya dari BPKP dulu Pak, di halaman 19 Bapak buka. Kinerja implementasi sistem keuangan desa versi kedua, ini ada beberapa provinsi Papua Barat, Papua, Kalimantan Utara. Prosentasinya sedikit sekali Pak, Bapak bisa memberikan alasan ini karena *spend of control*-nya kesulitan transportasi, disparitas atau bagaimana. Di data Bapak ini Papua Barat 51,55% dari 100%, kemudian Papua lebih rendah lagi atau 31,05% dan Kalimantan Utara juga masih di bawah 100% atau 75,62%. Jawa Tengah juga tapi sedikit saja, tapi sebagian besar provinsi

Bapak dari BPKP rata-rata sudah 100%. Saya mempertanyakan yang coklat ini, seperti Papua ini di bawah 50% atau belum mencapai 40%. Ini kendalanya apa Pak.

Begitu juga penguatan kapabilitas ini APIP ini Pak, ini terdapat beberapa provinsi seperti Sulawesi Tenggara juga Papua, ini capaiannya seperti belum ada Pak. Bapak bisa memberikan alasan itu kepada kami.

Kemudian di halaman 9, target dan realisasi output anggaran tahun 2019. Posisi per tanggal 27 Agustus 2019 ini ada beberapa kegiatan, pengawasan pembangunan nasional, keamanan akses negara, peningkatan ruang fiskal dan peningkatan tata kelola. Dari masing-masing komponen ini saya melihat peningkatan ruang fiskal masih 30% atau target 549 realisasinya baru 167 atau setara 30,42%. Pak, yang di atas ini target realisasi yang ini warnanya tidak sama jadi membingungkan juga. Jadi sesungguhnya ini apa, target dan realisasi pada warna yang paling di atas tidak sama dengan pengawalan pembangunan nasional. Barangkali itu salah diberikan warna atau laptopnya kurang bagus. Tapi prosentase realisasinya cukup 61,88%. Yang masih kecil ini target peningkatan ruang fiskal termasuk pengamanan aset negara dan daerah.

Satu tadi saya ada lupa terkait dengan pembangunan kantor BPKP. Masa di Maluku Utara belum ada kantor BPKP? Saya tidak buka lagi akan tetapi tadi terekam penglihatan saya kalau tidak salah Papua Barat, kemudian Maluku Utara. Pertanyaan, apakah Maluku Utara belum ada kantor BPKP. Saya sehari-hari lewat di depan Kantor BPKP Provinsi Maluku Utara. Jadi kalau ditaruh disini belum dibangun pusing juga saya atau salah posting barangkali.

KEPALA BPKP:

Kantornya sudah ada Pak, tetapi belum memadai sehingga perlu ditingkatkan.

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Sudah terekam tadi Pak, penglihatan saya nanti kita lanjut dulu masih banyak. Nanti saya lihat kita kembangkan lagi, tapi terekam mata saya pembangunan kantor BPKP di Papua Barat dan Maluku Utara. Memang dua ini anak kembar siam, Papua Barat, Gorontalo ini dalam satu keputusan Presiden lahirnya.

Saya ketika Reses itu selalu berkonsultasi dengan BPKP, BPK sebagai mitra di daerah pemilihan saya terkait dengan dana desa dan lain-lain, pengawasan dana desa dan lain-lain. Jadi saya tidak gagal paham soal yang satu ini Pak.

Selanjutnya BPK, BPK di halaman 11 terkait dengan tindak lanjut. Dari semua provinsi atau LKPD dari 542 tahun 2018 yang telah diserahkan terdapat 443 predikatnya WTP. Opini WDP berkurang sekali 16% dan 13 tidak memberikan pendapat atau setara dengan 2%. Pertanyaan saya pada halaman yang 12, kenapa ini tidak bisa dilaksanakan. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 5.312 rekomendasi atau 1% setara dengan 16,91 atau hampir Rp17 triliun, kenapa ini tidak

bisa ditindaklanjuti. Sangat material ini angkanya kalau Rp17 triliun, apa hambatannya ini Pak.

Kalau usulan penambahan dana barangkali tahun yang lalu Komisi ini memperjuangkan sampai terbawa ke Banggar karena kalau tidak ditambah berpengaruh terhadap tindaklanjut. Dan Bapak dari BPK, akuntabilitas keuangan negara yang juga merupakan mitra dari BPK ketika kunjungan kerja di berbagai provinsi ini menjadi sorotan dari BAKN bahwa prosentase tindaklanjut dengan yang belum ditindaklanjuti piramida terbalik, lebih banyak yang belum ditindaklanjuti. Sehingga pada satu ketika ini Mas Bambang hadir di ruangan Pimpinan DPR RI, saya mengatakan tapi guyonan saja. Sepertinya BPK setengah hat melakukan tugas, tetapi jangan disimpan di hati dan memang itu terbukti Bapak Menteri bahwa prosentase mengawal tindaklanjut itu kecil sekali.

Integritas profesionalisme dan satu lagi saya lupa ada 3 itu motto, integritas, profesionalitas. Itu kami jumpai di berbagai provinsi seperti begitu Pak, terbalik. Ini juga nampak disini. Pak, ini Rp17 triliun tidak kecil Pak, ini bisa dipindahkan kalau ini berhasil bisa dipindahkan untuk bangun BPKP di Maluku Utara, Papua Barat mungkin juga di Gorontalo, terlalu besar ini. Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 97 hampir 98 ribu atau setara dengan 19,1% atau dengan nilai Rupiah juga hampir Rp100 triliun, pasnya Rp94,81 triliun.

Telah sesuai dengan rekomendasi 385 rekomendasi, atau setara 75,3% dengan nilai Rupiahnya Rp149 triliun. Jadi ya cukup besar ini Pak, padahal satu pemeriksaan dianggap belum selesai apabila tindaklanjutnya juga belum selesai. Ataukah BPK mempergunakan mottonya bahwa opini BPK adalah satu pernyataan professional yang tidak bisa ditawarkan menawar atau tidak bisa dirundingkan, bahasa yang pasnya begitu.

Opini BPK adalah satu pernyataan professional yang tidak bisa dirundingkan. Dan kita pantau Bapak dari BPK, setelah ini mulai aktif hampir 2 tahun ini berbagai temuan yang kami dapat dilapangan seperti begitu Pak. Ini ditunjukkan bahwa tadi Pak, tidak bisa ditindaklanjuti kurang lebih hampir 17 triliun, bagaimana ini Pak.

Bahkan saya pernah mengatakan pada rapat kita yang terakhir, terdapat satu Pemerintah Kota yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa lagi menindaklanjuti sangat material. Ketika Bapak Dori ada disini dan berbisik, Bapak Hatari yang dibilang tadi di kota mana, saya kasih tahu sama dia saja untuk Bapak Dori saja. Dan itu jumlahnya triliunan Pak Menteri. Tapi kenapa BPK mengatakan mereka sudah lepas tangan tidak bisa lagi.

Nanti kita kembangkan ini banyak lagi juga menunggu menyampaikan pendapat. Bapak dari BPS, kenaikannya cukup ya dari pagu indikatif, kemudian pagu ini dari 5211 menjadi 7,9 atau saya pikir cukup menunjang kinerjanya BPS. Dan serapannya juga rata-rata baik. Maaf Pak, saya lupa tadi pada waktu kita rapat pertama tadi terkait dengan tenaga kerja yang berusia di bawah SD atau kurang lebih 45% lebih. Inikan tidak memenuhi kebutuhan pasar, besar sekali. Di bawah SD 41 sekian persen, tadi saya mau mempertanyakan itu Pak, padahal kita semua ini rata-rata mempergunakan *bancmarking*-nya bahwa peningkatan SDM yang punya daya saing dan berkualitas.

Dosen di semua perguruan tinggi di Indonesia ini berpredikat S3 juga belum sampai 4.000 atau kurang lebih 3.280 yang berpredikat S3. Kita terus pendidikan yang berdaya saing, yang berkualitas dan lain-lain, akan tetapi kenyataannya begitu. Dan hampir semua RK dari Kementerian/Lembaga tidak terlepas dari pendidikan yang berkualitas untuk Indonesia maju terakhir ini dan segala macam. Dan saya selalu berulang-ulang di Papua satu orang Polisi pangkatnya mungkin sama atau apa dia mengajar satu sekolah, tidak ada guru. Bangkunya itu kayu buah tidak ada lagi bangku biasa tapi kayu buah dan murid duduk di situ dan yang mengajar Polisi. Saya lihat tadi di bawah SD itu masih banyak sekali dan ini pasti sentiment pasarnya negative.

Dari saya Bapak Pimpinan, sementara begitu dengan harapan kita kembangkan lagi.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Pindah sebelah kiri Bapak Purnamasidi.

F-PG (H.M. NUR PURNAMASIDI):

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,
Bapak Menteri, Kepala Badan dan Lembaga yang hadir pada malam hari ini.**

Saya mungkin tidak ingin membahas angka detail yang sebelumnya disampaikan oleh Bapak Hatari. Cuma saya hanya ingin menegaskan sekaligus membuat komitmen bersama khususnya di Komisi XI DPR RI antara Anggota dan Pimpinan maupun dengan mitra kerja.

Pertama terkait dengan lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai pengawas, misalnya ada BPKP, BPK, LKPP. Saya pikir lembaga-lembaga yang mengawasi terutama LKPP misalnya mencegah di depan tentang selisih antara pagu dan realisasi itu menurut saya luar biasa. Jadi dalam waktu 4 tahun saja, 2015 24 triliun terus 2016 28 triliun, tahun 2017 30 triliun dan kemudian 2018 62 triliun. Kita saja tax amnesty saja hanya dapat 140 triliun. Ini setiap tahun potensinya bisa nambah terus, mungkin 2019 kira-kira berapa Pak.

KEPALA LKPP:

Kalau dilihat dari angka progress yang sekarang ini Pak, sampai dengan bulan Agustus kita pastikan bisa sampai nanti dengan KPU saja kemarin kita bisa 50%, terus kemudian di beberapa lain minimal 20% dari alokasi anggaran.

F-PG (H.M. NUR PURNAMASIDI):

Jadi ada terlihat bahwa kita memberikan anggaran itu ada sesuatu yang diselamatkan. Kita ini di Komisi XI DPR RI ini bertanggungjawab atas apa yang kita berikan kepada Kementerian Keuangan untuk mendiskusikan uang yang ada di negeri ini. Jadi walaupun saya ada catatan sedikit di BPKP, jadi misalnya anggaran untuk dukungan manajemen itu lebih besar daripada pengawasan, ini juga menurut saya perlu diperbaharui Pak. Jadi jangan sampai diberikan itu, padahal dengan BPK, BPK untuk mengawasannya lebih besar dibandingkan dengan dukungan untuk manajemen.

Kalau saya sih beberapa pun yang diminta oleh LKPP, BPKP dan BPK, menurut saya ini harus diperjuangkan betul. Kalau misalnya BPK sekarang masih butuh tambahan 800 sekian miliar, kemudian tadi LKPP 116 miliar, terus BPKP juga tadi saya belum lihat, akan tetapi prinsipnya itu Pimpinan. Prinsipnya bahwa bagi saya lembaga-lembaga ini harus kita perkuat betul, karena apa? karena ini menyangkut efisiensi dari perencanaan anggaran yang dilakukan oleh KL yang ada. Jadi ada penyelamatan-penyelamatan yang itu menurut saya itu bisa menjawab problem kita selama ini terkait dengan semakin besarnya defisit anggaran. Disisi lain ada defisit anggaran, sisi lain ada temuan-temuan yang kemudian ada efisiensinya yang luar biasa. Kalau kemudian ini kita tanya kira-kira untuk menjadi LKPP yang terbaik itu butuh berapa anggarannya. Walaupun memang harus ada ukuran-ukuran yang harus kita sepakati, karena kalau tidak makanya misalnya kemarin kita rapat gabungan dengan Komisi IX DPR RI ada 27 juta BPJS yang masih Berarti kita kan juga butuh menambah misalnya anggaran untuk DPR RI bagaimana bisa memberikan data yang baik. Apalagi tadi kita sepakati bahwa kebutuhan kita 5,3%. Berarti Bappenas ini juga kita tanya cukup tidak 1,8 triliun itu untuk memastikan bahwa memang capaian-capaian itu benar-benar bisa dipenuhi.

Jadi menurut saya memang selama ini memang kita belum punya kesepakatan Pimpinan, artinya saya misalnya dari Fraksi Partai Golkar salah satu Anggota di Banggar, kemudian ada Bapak Ecky juga, ada sapa lagi. Menurut saya kita harus sepakati bahwa kemudian kita harus mengawal dan ini menjadi sesuatu yang memang misi dari Komisi XI DPR RI untuk membantu Bapak-bapak ini untuk memaksimalkan fungsinya. Terutama misalnya hari ini misalnya Bapak Menteri Bappenas, jangan sampai salah merencanakan terkait dengan pemindahan Ibu Kota.

Jadi kita harus tanya butuh berapa anggaran untuk kemudian bagaimana perencanaan yang dibangun itu betul-betul bisa maksimal. Karena perencanaan itu kemudian efek pada 15-20 yang akan datang.

Saya pikir saya tidak ingin mengomentari angka-angkanya, tapi kita harus punya komitmen yang kuat bagaimana memperkuat lembaga LKPP, BPKP dan BPK ini. Berapa pun yang mereka minta menurut saya selama itu ada ukuran-ukuran yang bisa kita sepakati itu harus kita perjuangkan. Begitu juga untuk memaksimalkan, mensinergikan antara BPS yang mau membangun big data dengan BPS yang akan melakukan apa yang bertugas untuk menyajikan data-data yang diperlukan terkait dengan perencanaan pembangunan, saya pikir juga itu sesuatu yang harus menjadi komitmen kita bersama.

Saya pikir itu, prinsipnya saya hanya ingin mengajak kita semuanya untuk membangun komitmen itu sehingga kemudian menjadi penugasan dari Komisi XI DPR RI kepada Anggota Badan Anggaran yang berasal dari Komisi XI DPR RI untuk bagaimana kemudian kita berkomitmen memperjuangkan ini sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para mitra kita.

Saya pikir itu saja, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Warabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Lanjut Bapak Amirul Tamim.

F-PPP (Dr. H. Mz. AMIRUL TAMIM, M.Si.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Warabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati, Bapak Menteri beserta jajaran, dan para mitra yang saya hormati.

Kalau kita lihat mitra-mitra ini yang duduk malam hari ini, hemat saya bahwa ini ada lembaga yang sangat strategis untuk menentukan langkah kita kedepan dengan berbagai tantangan. Dengan di sini ada perencana, ada pengawas, ada tugas statisti yang tentu kita berangkat semua dari data. Saya coba untuk mengomentari atau sedikit untuk bertanyalah, terkait dengan Bappenas kalau lihat pagu anggarannya 1 triliun lebih Pak. Angka 1,8 untuk bagi lembaga perencana nasional seperti ini saya kira sangat kecil Pak.

Ini ada 10 program dalam tahun 2020, program yang pertama ini saya lihat ini cukup berat sebenarnya kalau ingin kita bagaimana membuat satu perencanaan dan penganggaran seperti finalisasi RPJMN 2020 dan 2024 dan persiapan penyusunan RKP. Kalau ini kajiannya, analisisnya, kemudian rumusannya tidak komprehensif untuk menggali potensi kita dan untuk menentukan tujuan kita kedepan, saya kira pengalaman perjalanan kita ini menurut hemat saya ini banyak perlu dikaji betul, dianalisa betul agar ada sinkronisasi Gerakan semua elemen. Kita melihat bahwa potensi-potensi kekayaan kita belum tergali dan termanfaatkan sedemikian rupa.

Kalau ini belum tergali dan bisa termanfaatkan seluruhnya, menurut hemat saya analisa kita, kajian kita, masih ada kekurangan.

Data-data kajian yang kita kumpul sebagai landasan untuk membuat rencana, ini juga belum optimal. Belum maksimalnya ini menurut hemat saya karena data untuk lembaga-lembaga ini menurut hemat saya tidak cukup untuk bagaimana bisa menggali potensi melakukan analisa.

Saya contoh saja Pak, kalau seperti Bappenas melakukan juga bagaimana agar kesenjangan wilayah itu bisa tidak terjadi kesenjangan yang begitu, tentukan peran lembaga-lembaga lain. Saya kasih contoh saja Pak, Kementerian Perdagangan banyak program pembangunan seperti pasar, pasar kecamatan dan lain sebagainya. Apakah Bappenas ini melihat bahwa ini berhasil, hampir mungkin sekian di atas 50% pasar-pasar kecamatan itu makrak dan menjadi bangunan yang tidak termanfaatkan. Itu satu contoh.

Kita mengembangkan potensi untuk bagaimana ekonomi untuk daya saing kita ke depan seperti potensi pariwisata kita. Coba kaji terkait dengan pariwisata dengan potensi wilayah-wilayah yang tidak sedikit program yang bernuansa pariwisata miliaran kemungkinan sudah triliun dari sekian tahun, tapi kan tidak memberikan hasil apa-apa. Di daerah-daerah hanya bikin festival-festival yang tidak sedikit biayanya tetapi dampak untuk menarik pariwisata itu sendiri tidak ada, hanya pemborosan sesaat dan kemudian tidak memberikan dampak untuk bagaimana menggali potensi itu.

Kenapa ini terjadi? Karena kajian kita tidak dalam untuk menggali potensi-potensi itu. Contoh kecil saja untuk di daerah saya Pak, pembangunan smelter di beberapa titik, Kendari, kemudian di Sulawesi Tengah, di Morowali. Di situ ada pertumbuhan sebenarnya magnet-magnet ekonomi, tetapi apa yang terjadi? Infrastrukstur untuk menuju kesana sudah 5 tahun makrak jalan-jalan itu yang tadinya sebelum ditangani oleh proyek itu bisa kita tempuh 3-2 jam, sekarang bisa 10 jam. Dulu waktu masuk Morowali itu lewat Kendari, supply barang untuk ke Morowali itu Kendari yang mempunyai peran. Tapi begitu diabaikan jalan itu mutarnya Mamuju, Sulawesi Selatan. Itu satu contoh kecil bahwa amatan kita untuk memuat satu perencanaan yang terpadu ini saya kira masih lemah. Itu kalau saya perbandingan dengan 1 triliun lebih anggaran lembaga Bappenas seperti ini, terlalu kecil.

Belum lagi tahun 2020 kebijakan pemindahan Ibu Kota, bahwa kebutuhan anggaran yang sudah kita tahu semua yang Bappenas sampaikan 400 triliun lebih, itu mungkin dana untuk pembangunan infrastruk dari sektor Pemerintah. Tapi dampak dari sebentar itu yang beban yang swasta dan masyarakat apa sudah kita hitung, yang nanti kemudian efeknya kalau kebijakan kita nanti penyusunan RPJMN 2020-2024 tidak kena wilayah-wilayah lain kemungkinan ada efek kecemburuan lagi, ada cost lagi untuk menangani kecemburuan-kecemburuan itu. Nah, ini perlunya kajian-kajian yang seperti itu.

Semua titik wilayah kita ini potensinya besar Pak, sebelum kita jadi republik kalau kita jejak sejarah panjang kita, berbagai komoditas-komoditas sebelum Republik ini banyak komunitas-komunitas asli yang sebenarnya itu potensinya pasar

global. Tapi dalam perencanaan-perencanaan kita eksekusi dari proyek-proyek itu tidak tepat, pemeliharannya tidak tepat, kakao yang sudah sekian tahun sudah kita andalkan tapi sekian tahun kita tidak berikan lagi suntikan-suntikan apa semua, kita berpindah kepada sektor-sektor lain itu akhirnya juga tidak ini, kelapa masyarakat yang dulu dia jual 100 kg dia bisa setara dengan 4 karung beras, sekarang dia jual 100 kg tidak cukup 1 karung beras. Itu satu contoh kecil yang berdampak dari lemahnya saya kira menggali dan menganalisa potensi-potensi yang sebentar dieksekusi oleh lembaga-lembaga lain.

Kemudian yang kedua Pak Menteri, terkait dengan saya ingin mungkin gambaran-gambarannya model pengembangan manajemen talenta. Saya kira kemarin Bapak Menteri juga menyampaikan bahwa tamatan jurusan kejuruan yang paling banyak menganggur. Apakah ini memang kurikulum sekolah kejuruan ini tidak bisa untuk terserap pasar kerja, atau memang talenta yang ikut sekolah ini. Saya kira kita harus bagaimana memberikan dukungan terhadap pernyataan Bapak Presiden bahwa perubahan itu begitu cepat, sebentar lapangan kerja yang ada itu kemungkinan hilang dan kemungkinan lapangan-lapangan kerja baru yang ada. Nah, ini mohon gambarannya Pak, ini terkait dengan pengembangan manajemen talenta. Ini bagaimana modelnya sehingga siapa-siapa saja berperan dalam manajemen talenta ini. Itu yang kedua.

Kemudian terkait dengan saya ingin mohon penjelasan ini terkait dengan program penguatan kemampuan perencanaan Pemerintah Daerah Pak. Karena kelemahan yang saya lihat tidak terpadunya program. Bappeda Provinsi tidak tahu membaca program RJP nasional. Kenapa tidak terbaca? Karena pengangkatan pejabat Bappeda itu, itu selera yang tidak berbasis kompetensi orang perencana. Mahal kita buat perencanaan RPJ nasional Pak, tapi aparat Bappeda itu tidak tahu baca. Kita mendukung kita ini tapi polanya untuk melakukan penguatan perencanaan melalui Diklat itu bagaimana. Saran saya memang itu harus per regional, perencanaannya itu per regional mengikutkan Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten Kota akan tetapi dalam regional yang mungkin punya kaitan-kaitan sehingga jangan semua nanti perencanaan bangun pelabuhan semua.

Pengalaman kita yang lalu-lalu kan semua menjadi kota pelabuhan, semua menjadi kawasan pariwisata, tapi fasilitas pendukungnya dan lain-lain tidak ada, akhirnya semuanya mahal. Belum lagi kalau kita lihat politik-politik infrastruktur yang mematikan karena kawasan itu bukan pendukungnya dia dalam Pilkada tidak dibangun, padahal itu daerah potensial. Ini semua mungkin yang perlu harus terjawab dalam ini, tentu harus perlu dukungan anggaran terhadap Diklat-Diklat ini. Ini untuk Bappenas saya hanya itu untuk Bappenas.

Kemudian BPK, saya tidak panjang untuk BPK. BPK ini anggaran APBN kita 2500 triliun, tapi anggaran pengawasan BPK turun. Jadi Pimpinan, kita mendukung untuk usulan permintaan penambahan BPK ini dari sekarang 2500 APBN kita tapi anggaran, ini kuncinya pengawasan terhadap penggunaan anggaran ini. Jadi saya mendukung untuk penambahan untuk BPK, saya kira BPKP juga mohon fokusnya juga BPKP terhadap dana desa. Kalau laporan Pemerintah 2 hari yang saya ikuti, kelihatan dana desa ini andalan betul. Tapi pengalaman kita, pengamatan kita di

lapangan ini masih banyak masalah besar terkait dengan dana desa. Jadi perlu memperhatikan apa prioritas-prioritas pembangunan desa itu dan bagaimana dampaknya terhadap pembangunan desa itu. Harus jujur Pak, agar bisa tahun 2020-2024 ini bisa betul-betul menjadi andalan dana desa ini.

Kemudian BPS, ini juga kalau lihat bahwa programnya Sensus 81% dananya terserap untuk Sensus. Saya tidak tahu mungkin mohon penjelasan ini Sensus ini *item-item* apa saja nanti yang bisa, apakah masih sama dengan *item* yang lalu untuk kita mendapatkan data itu atau ada tambahan-tambahan lain untuk mendukung dari program-program RPJMN tahun 2020-2024.

Saya kira itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Warabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan Bapak Haerul Saleh.

F-P. GERINDRA (HAERUL SALEH, S.H.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Warabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita sekalian,

Shalom,

Om swasti astu.

Pak Menteri, Kepala BPKP, Kepala LKPP, Kepala BPS beserta seluruh jajaran, Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati.

Pak Menteri, saya boleh ijin interaktif, ini pemindahan Ibu Kota serius tidak ini Pak.

KEPALA BPKP:

Serius Pak.

F-P. GERINDRA (HAERUL SALEH, S.H.):

Oke, tidak apa-apa kalau serius tidak masalah, itu yang masalah kalau tidak serius. Sudah seperti begini publikasinya, karena ini dampaknya luar biasa, kecemburuan sosial di tengah masyarakat sudah mulai muncul. Di sana itu di daerah Kalimantan konflik-konflik tanah misalnya sudah mulai juga muncul, makelar-mekelar itu sudah siap-siap belanja tanah untuk persiapan Ibu Kota. Nah,

pertanyaan saya mungkin sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Amirul Tamim, apakah misalnya kajian-kajian yang dilakukan Bappenas ini hanya akan melahirkan sebuah kajian yang mendukung program Pemerintah itu ataukah mungkin saja hasilnya itu bisa saja mengeluarkan rekomendasi untuk tidak dilakukan berdasarkan kajian-kajian yang dilakukannya. Karena kalau misalnya kajiannya itu adalah pasti hanya akan menunjang keinginan Presiden misalnya ya tidak usah, tidak usah dikaji langsung saja dilaksanakan. Nah, pertanyaan saya disitu.

Oleh karena itu, saya kira bukan kecilnya anggarannya. Saya sangat setuju kalau anggaran Bappenas itu dari dulu, dari awal kita di DPR RI, kita sudah menginginkan agar atau meminta Bappenas ini dikembalikan fungsinya sehingga bisa menjadi fungsi yang kuat dan menjadi merupakan kementerian yang strategis dalam urusan pembangunan nasional. Tapi sayang sekali anggaran yang sekarang ini tentu saja kita sayangkan ini hanya untuk bagi saya kalau lihat dari dokumen tadi ini tidak akan memenuhi harapan-harapan kita bagaimana kementerian ini bisa menjadi kementerian yang menjadi sumber atau penganalisis kajian-kajian tentang perencanaan pembangunan nasional kita.

Nah, disini tadi dokumen ini saya lihat tidak ada nilainya, inikan tidak masuk satuan 3, masih umum. Jadi kalau bisa sih kita juga mau tahu sebetulnya, kita tidak mau tahu *item*-nya apa yang mau dikaji, Cuma mau tahu umumnya itu berapa anggarannya pada sisi misalnya kajian pemindahan Ibu Kota dan sebagainya. Bisa dilihat Pak, mungkin disitu kosong kita hanya disampaikan secara umum semuanya totalnya, tapi kita tidak ada satuan 2.

Dan selanjutnya untuk BPKP, BPKP pada saat rapat beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan temuan saya khususnya di Sulawesi Tenggara, bahwa Siskedes yang dikembangkan oleh BPKP ini cukup berhasil. Nah, pertanyaan saya kemarin itu apakah mungkin Siskedes ini dijadikan sebuah sistem yang wajib digunakan oleh desa. Karena kalau itu berhasil karena beberapa desa itu masih belum membahas waktu pada saat rapat kita ini terakhir masih ada 60 berapa persen belum menggunakan sistem Siskedes ini.

Oleh karena itu, kami menganggap kalau ini memang berhasil, kalau ini mampu menekan atau menekan jumlah desa-desa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap penggunaan keuangannya, ini kenapa tidak kita patenkan menjadi sebuah sistem baku yang harus digunakan oleh semua desa. Ini sistem Siskedes ini, BPKP jual kan ke desa, dijual kan, gratis?

KEPALA BPKP:

Gratis.

F-P. GERINDRA (HAERUL SALEH, S.H.):

Kalau gratis kenapa tidak semuanya pakai Pak.

KEPALA BPKP:

Yang mewajibkan itu kan bukan BPKP Pak.

F-P. GERINDRA (HAERUL SALEH, S.H.):

Betul memang, maksud saya begini, kalau memang itu betul efektif kenapa tidak kita ini dalam rapat ini juga kami minta kepada Pimpinan untuk merekomendasikan agar Siskedes ini diwajibkan untuk merekomendasikan kepada Mendagri untuk mewajibkan penggunaannya pada seluruh desa yang ada di Indonesia ini. Itu tentu saja akan memudahkan dan lebih meringankan kerja-kerja BPKP kedepan. Saya kira mungkin begitu.

Selanjutnya saya mau tanya kepada BPKP, saya tadi baca juga tentang target output. Target output yang dimaksudkan ini apa Pak? target output yang dimaksudkan dalam dokumen tadi ini berupa anggaran yang di hemat atau apa.

KEPALA BPKP:

Jumlah laporannya Pak, outputnya itu.

F-P. GERINDRA (HAERUL SALEH, S.H.):

Maksudnya apa Pak?

KEPALA BPKP:

Jumlah laporannya Pak.

F-P. GERINDRA (HAERUL SALEH, S.H.):

Kan di sini jumlah laporan yang dimasukkan disini ada nilainya Pak, ada nilainya di sini, targetnya 9 triliun dan realisasinya baru 5 triliun. Itu apa Pak, yang dimaksudkan.

KEPALA BPKP:

Itu anggarannya Pak, di slide berapa itu Pak?

F-P. GERINDRA (HAERUL SALEH, S.H.):

Target output Pak, ya sudah nanti saja Pak.

Oke, selanjutnya kepada BPK. BPK saya sependapat tadi Pak, BPK dari dulu dengan teman-teman sebelumnya harus ditingkatkan anggarannya. Hanya saja ada satu tadi sedikit saja yang mau saya tanya, apa artinya optimalisasi pemanfaatan

anggaran negara. Saya agak sulit menterjemahkannya, apakah menghabiskan uang atau bagaimana.

Kepada BPS, ini besaran anggaran untuk memenuhi target PPIS yang terkait dengan Sensus Penduduk ini sekitar 81% anggaran BPS. Nah, BPS inikan sudah seringkali melakukan Sensus Pak, apakah caranya memang tetap sama atau ada kreatifitas yang baru untuk mengefisienkan anggaran serta mengefektifkan kinerja-kinerja teman-teman yang melakukan Sensus ini. Supaya anggaranya itu bisa lebih kecil Pak, kan ini seringkali kita melakukan Sensus masa tidak ada peningkatan kita menggunakan IT dan sebagainya untuk lebih memudahkan, sehingga anggaran yang kita gunakan pun lebih sedikit.

Saya kira itu saja Pak, LKPP selamat dapat dukungan dari teman-teman.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Warabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Cukup ya, tidak ada mau bertanya lagi.

Silakan Bapak Ecky.

F-PKS (H. ECKY AWAL MUHARAM):

Saya sebenarnya kecewa Pak Menteri, Bapak Kepala BPKP, BPS, ini semakin kesini itu semakin tidak menunjukkan sebuah penyajian seperti memang mau serius mau minta anggaran, bukan soal mau mengerjakannya. Saya yakin ketika Bapak-bapak mengajukan untuk mencapai dapat pagu indikatif, perjuangan disitu, Musrenbang, bicara dengan Bappenas dan Menteri Keuangan itu ya kayak gini. Saya melihat 10 tahun terakhir ini malah menurut saya menurun. Kalau pakai data-data ini sebetulnya kalau opini saya itu disclaimer, tidak bisa memberikan opini, ini bisa diterima atau tidak sebenarnya pengajuan anggaran kayak begini. Jadi bagaimana, sedih sebenarnya.

Sebetulnya kan bisa saja misalnya yang dipaparkannya sederhana tetapi dikasihlah bagi yang berminat saja, tidak usah dicetak 50, tapi pastikan ada yang berminat Pak. Walaupun ini tidak memadai tapi lumayanlah BPK ini ada kayak gininya. Saya baca-baca, pulang dari sini saya baca-baca, ini pribadi ya teman-teman. Walaupun saya sebagai mitra Bapak-bapak setuju saja pasti, tapi kan tidak bisa berasumsi. Kita itu punya sebuah tanggungjawab kan bukan Cuma tanggungjawab kami dengan Bapak-bapak, tapi juga ada pertanggungjawab juga. Serius tidak saya ketika saya memberikan ini uang rakyat. Kebayang tidak Ibu-ibu beli sesuatu barang yang kena PPN di pelosok sana dan kontribusi PPN itu cukup besar di dalam perpajakan kita. Kebayang tidak seorang buruh yang di atas sedikit dia kena pajak sebagai pegawai berpenghasilan tetap dan kontribusi pajak penghasilan tetap ini cukup dominan dibandingkan dengan yang PPH orang yang 100 terkaya itu secara akumulatif.

Saya jadi teringat tadi dalam sesi sebelumnya, kata Menteri Keuangan kita akan berusaha untuk senantiasa lebih berkualitas dalam mengevaluasi belanja barang dikurangi dan sebagainya. Perlu analisis- analisis, saya yakin itu sudah dilakukan dalam proses dan kami juga ingin melakukan hal yang sama. Kan saya bertanya-tanya misalnya kenapa BPK bisa turun signifikan dibandingkan, jangankan BPK, DPR saja yang juga punya fungsi pengawasan, yang ramai ketika kemarin. Saya sih tidak di BURT ya, tetapi yang jelas dimintai juga Fraksi-fraksi untuk bagaimana ini dipotong dan sebagainya. Saya sih tidak bisa opini juga, karena apa? karena saya juga tidak di BURT yang tidak tahu detailnya kan.

Okelah, saya ngerti itu keputusan politik pada akhirnya. Artinya, ketika DPR RI tidak berhasil pun di luar dalam konteks substansi yang diajukan oleh Sekjen secara politik pun ternyata dalam tanda petik *weekness* dalam bab itu. Artinya, apalagi mau menolong Bapak-bapak itu, tadi usulan dari teman-teman. Saya Cuma pesan waktu itu kepada Ibu Menteri Keuangan karena juga diminta teman-teman, kita ramai-ramai, yang penting jangan dipotong sesuatu yang sudah menjadi hak publik, seperti Reses. Soal beli Gedung dan sebagainya saya sih tidak tahu, tapi ini bagaimana cara mengoreksinya, kan begitu. Pembacaan dalam logika terbalik atau dalam konteks bahasa evaluasi di dalam konteks Syariah *Mafuh Mukholafah*. Saya bawa kesitu tidak apa-apa supaya tidak ada lagi kata-kata Syariah.

Ini agak menyimpang sedikit Pimpinan, tidak apa-apa, kan direkam ini. Teman-teman sekalian, saya pernah ditanya apa sih ekonomi Syariah. Saya bilang “eh, sebetulnya Syariah dalam konteks hukum itu hanya sekian persen saja”, kalau yang Muslim yang namanya sholat mulai dari wudhu sampai bagaimana sholat itu Syariah, bagaimana dia berpuasa itu Syariah. Yang menjadi alergi dalam tanda petik yang mungkin menjadi bahan perdebatan kan masalah hukum pidana syariahnya.

Baik, kembali ke laptop.

Bapak dan Ibu sekalian.

Kalau pakai logika terbalik, *Mafuh Mukholafah* tadi ketika BPK turun dengan asumsi sudah dievaluasi oleh Bapeda dan Kementerian Keuangan, dengan kata lain kalau saya berasumsi, berarti program-program atau anggaran yang diajukan oleh BPK RI tersebut dalam tanda petik tidak berkualitas secara dalam konteks anggaran. Itukan beresiko bagaimana saya memperjuangkannya ketika kami tidak diberikan informasi yang sama ketika Bapa-bapak mengajukan kepada Menteri Keuangan. Kementerian Keuangan yang detail saja motong.

Bapak dan Ibu sekalian.

Bahkan yang paling sedih adalah sebetulnya yang dipotong itu adalah sama-sama mitra Komisi XI DPR RI, padahkan duduk saja sebelum Pagu indikatif. Kita panggil rapat bersama mitra Komisi XI DPR RI, kan begitu.

Apalagi Bapak Menteri PPN paham betul karena beliau juga Menteri Keuangan. Kalau sudah keluar nota keuangan, sudah keluar pagu sementara yang

namanya pembahasan di Banggar penambahan celah fiskal, penambahan kapasitas fiskalnya sedikit-sedikit saja dan sudah ada siapa kementerian yang akan menerima. Dan itu kebanyakan Kepolisian, selama daripada empiris Kepolisian, BIN, APH kebanyakan, seperti itu.

Artinya, BPK hampir dikatakan ya anda yakini lagi harusnya secara politik mengatakan memang itu tugas sekretariat Jenderal BPK, tetapi bisa saja. Ini kalau misalnya ingin meningkatkan *good governance*, ingin meningkatkan *capability*, ya anggota BPK-nya berbicara kepada Presiden sekali pun, jangan dipotong ini kan begitu, dan bisa diyakinkan. Bukan tidak memperjuangkan, ini saya menyampaikan realitanya.

Saya kasih contoh kecil saja, terkait dengan hal yang membuat saya menjadi disclaimer. Kalau opini, maksud saya tidak susah memberikan pendapat ini sepertinya layak atau tidak layak sih seperti anggaran, kecuali karena *khususon* saja, apalagi ke LKPP, kenapa? LKPP dibidani dan dibicarakan proses pembentukannya dengan Komisi XI DPR RI periode yang lalu. Sampai ke logonya saja dibicarakan, kenapa K nya merah seperti KPK, saya bertanya seperti itu. Termasuk skema SDM dan sebagainya dibicarakan. Jadi kalau konteksnya *khususon* yang sudahlah setuju saja, tapi kan tidak cukup demikian.

Contoh sederhana sekali misalnya, terkait dengan membicarakan realisasi 2019 saja, itu kan beda-beda. Ada yang BPK per 19 Agustus menyampaikan peringkat ke-12, kan kalau peringkat artinya harus sama dengan yang lain dan ada sebuah data dokumen yang menyebutkan peringkat tersebut. Itu *position* kapan peringkat itu kan, tidak usah dijawab. Artinya, inikan bisa *misleading*, di BPKP per 27 Agustus, LKPP per 26 Agustus, ini yang disajikan disini, masih mending Bappenas ada tanggapan per-nya tetapi juga ada bulannya dan ada grafiknya, saya *apresiate* kalau dalam paparan yang ini, kan kita bisa enak memahaminya, oh trennya kayak begini, realisasinya kelihatan. Rencananya penyerapan serapan pakai grafik biru, simpangannya segini, walaupun rendah simpangannya karena alasan dan sebagainya, tapi belum dijelaskan detailnya kenapa. Ini hanya satu contoh saja, tidak dijelaskan dengan pemaparan seperti ini penyebab dan sebagainya.

Bapak dan Ibu sekalian.

Dan setiap tadi saya buka-buka saya bandingkan sampai saya bertanya ke staf ahli. Ini kita kasih apa namanya, pernah tidak kita melakukan evaluasi pemaparan selama 5 tahun terakhir ini dan kemudian memberikan sebuah bagan, ini minimal begini loh yang kita inginkan untuk mengambil sebuah keputusan.

Saya tidak bisa memberikan opini bahwa saya bisa menerima atau tidak menerima pengajuan Bapak-bapak. Tapi karena Bapak-bapak itu mitra, saya setuju saja deh. Kontennya berbeda-beda dan lain sebagainya, bahkan ada program disebutin programnya tapi ketika ngomongin minta angka ujug-ujug saja sekian triliun, program per programnya tidak ada angkanya.

Sebetulnya kan gampang ini, tidak susahlah untuk menyajikan secara baik angka-angka, selain menyakinkan programnya, angka-angkanya itu standart kok.

Pakai saja yang diajukan kepada Menteri Keuangan dan Bappenas, Cuma diresume, tidak perlu sampai detail sampai kepada kegiatan dan sebagainya.

Bapak dan Ibu sekalian.

Walaupun saya kecewa, ya terimalah tetap harus diperjuangkan. Kalau bisa ditambah ya ditambah, tapi saya tidak yakin sejarah membuktikan Komisi XI DPR RI tidak bisa menambahkan kepada mitra-mitranya dari hasil pembahasan di Banggar. Kenapa? Karena memang perjuangan itu kalau menolong mitra-mitra kita, kita rembuk bareng-bareng sebelum pagu sementara, pagu indikatif. Karena apa? karena kalau sudah hasil seperti itu political point, bukan soal masalah argumentasi anggaran.

Pimpinan terima kasih atas kesempatannya, karena ini adalah terakhirnya di periode sekarang. Mudah-mudahan periode yang akan datang saya ketemu dengan Bapak dan Ibu lagi. Bapak Bambang masih jadi Menteri, soal menteri-nya apa saya tidak tahu juga Pak. Tapi pesan saja Pak, terkait dengan pemindaahan Ibu Kota, coba ditambahkan juga analisis apa impact fiskal yang 5 tahun setelah memang dipindahkan Ibu Kota tersebut.

Saya punya analisis secara global, karena sumber datanya tidak seperti Bapak-bapak. Tapi memang mungkin ada *political will* dari Pimpinan Pemerintah, tetapi tetap harus dikedepankan karena ini soal penyelamatan bangsa, aspek historis, aspek sosiologis, aspek antropologis, aspek politis. Saya masih punya keyakinan itu akan dipertimbangkan benar-benar secara mendalam, artinya tidak dihantui ini adalah sebuah gagasan yang harus goal. Pada kesempatan ini saya akan mengundang Bapak Menteri untuk membicarakan dengan Fraksi PKS, karena tidak tahu ini Gerindra, apa tetap jadi opisisi atau Cuma PKS saja yang opisisi, kan begitu.

Ketika tax amnesty saya bicara tax amnesty, saya akan buka kartu saja, itu konsultan-konsultan pajak top itu nyari saya. Kenapa kalian menanyakan kepada saya, anda tanya kepada Pemerintah saja, "Kami mau tanya kepada Bapak secara khusus, kenapa? Karena Bapak beda sendiri" katanya. Dengan beda sendiri, biasanya kalau beda sendiri punya argumentasi yang lebih tidak selalu sama dengan yang lainnya. Karenanya saya mengundang Bapak Menteri supaya kita bisa bertukar pikiran nanti Ibu Kota ini, masukan-masukan. Tadi saya sudah ngobrol juga, terima kasih mudah-mudahan nanti bisa datang.

Pimpinan, demikian secara prinsip walaupun sesungguhnya saya kecewa. Dan sesungguhnya sudah tidak beropini, tapi saya terimalah, PKS terima usulan Bapak-bapak, kita berjuang, walaupun sedih karena BPK tidak bisa juga ternyata. Sudah diruntin itu tanggal sekian, tanggal sekian, saya bilang memang Anggota BPK-nya kan sudah ngasih LKPP WTP ya. Walaupun WTP itu bukan sesuatu yang buttering, tapi sih saya senyum saja. WTP itu juga harus memang sudah haknya, tetapi yang membuat saya lebih senyum lagi terkait dengan WTP ini ketika membaca dari Bappenas. Memang estetikanya bagus, muter kayak begini, tapi orang kan ketika pemaparan itu capture-nya apa *massage*-nya. Seolah-olah WTP

malah turun itukan, bukan Bappenas ya tapi LKPP. Ibu Indah saya bilang “ini tidak salah ini”, tapi itu tidak ilmiah itu Pak.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Sebentar ya, jadi kita akhiri rapat kita ini nanti jam 22.00 WIB. Setuju ya maksimal?

(RAPAT: SETUJU)

Silakan Ibu Indah.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Pimpinan, sebenarnya saya sudah tidak usah bicara karena saya ingin mengakhiri rapat ini bersama kawan-kawan jam 21.00 WIB, karena jadwal rapat inikan seharusnya jam 16.00 WIB tapi karena sudah terlanjur malam ya sudah saya ngomong sekalian saja. Sudah percuma, sudah titik darah penghabisan disini, kalau tidak ngomong kan juga jadinya, tadinya mau pulang jam 21.00 WIB tidak usah ngomong biar pulang, eh tidak tahunya sudah jam segini belum belum juga ya sudah saya ngomong.

Jadi tadi Bapak Ecky menyatakan disclaimer, dari hasil pemaparan tadi betul Bapak Rony tadi kita rembukan. Ini loh Pak, opini BPK ini memang cantik, indah, akan tetapi sekilas kalau kita kenapa turun dan WTP disini. Nah, cantik tapi ini kurang informatif, tapi tidak apa-apa kalau dianggap ini adalah seni saya masih bisa menerima sebagai orang seni.

Sebenarnya mungkin itu juga sebagai jawaban kenapa bukan kita merasa tidak dihargai tapi seolah-olah memang kalau datang ke Komisi XI DPR RI ini seolah-olah memang pemaparannya ya seadanya, formalitas, apakah itu juga yang membuat jadi minat kawan-kawan untuk datang rapat inikan tinggal sedikit dari 55 Anggota hanya ini kami, berikan tepuk tangan untuk kami yang masih tersisa ini. Dengan segala kejenuhan kami dari pagi, tetapi saya ini pakai kebaya dari pagi Paripurna hari ini DPR RI Dirgahayu, tapi justru ini aman karena saya tidak kedinginan. Tetapi itulah kita mencoba menjadi mitra yang baik dan kita mendengarkan dengan seksama.

Apapun tadi kebutuhannya dari Bapak-bapak sekalian, enak ini pengajuan contohnya LKPP itukan kekurangannya itu mengusulkan bertambah 116 dan seterusnya kita tidak ada masalah. Bapak Ecky sempat menyinggung tadi, DPR RI sendiri itu anggaran kami dipangkas 55%. Tidak bisa hidup, kami tidak bisa menjalankan aktifitas apalagi kami ini jumlahnya itu dibandingkan tahun sebelumnya kita turun drastic. Sementara Anggota kita bertambah menjadi 575 masih kita

bicarakan bersama. Jadi problem untuk anggarannya memang dialami oleh seluruhnya, istilahnya mungkin *sharing the plan* bagaimana saya kurang tahu yang pasti kita diharapkan untuk efisien, efektif, produktif, ekonomis dan lain sebagainya. Tidak ada masalah untuk usulan-usulan toh itu juga kembali kepada kepentingan untuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat kita. Itu nanti akan diambil keputusan secara bersama, mungkin kalau malan hari ini tidak bisa terjadi pengambilan keputusan karena jumlah kami memang sangat sedikit, nanti Pimpinan akan memutuskan.

Namun demikian, ada beberapa catatan yang sudah saya siapkan untuk saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mulai dari BPS saja dulu, BPS itu kan adalah penyaji untuk informasi dan kontrol untuk publik. BPS mengunggah informasi tentang indikator kinerja utama yang ditetapkan hanya pada tahun 2017. Terlihat dalam gambar, saya tidak menampilkan di screen, itu tahun 2018 dan 2019 belum diunggah sampai dengan 2017 saja dari BPS itu diunggah. Kalau informasi publik tidak actual tentu partisipasi publik juga tidak akan muncul.

Dan BPS sebagai lembaga penyedia data dan menjadi rujukan berbagai pihak karena memang kebijakan one data. Harusnya BPS menjadi pelopor dalam aktualitas data dan informasi. Terus dalam rencana kerja tahun 2019, BPS menargetkan jumlah *viewers*-nya itu external yang mengakses data itu melalui website itu sebanyak 1.100.000. Nah, bagaimana publik bisa tahu capaian itu kalau statistika pengunjung tidak tampil secara online. Ini ada disini Pak, tapi saya tidak tampilkan disini.

Kemudian untuk yang BPK, kita tahu memang opini WTP itu tidak mencerminkan bahwa Kementerian, Lembaga, Pemda, sama sekali bersih dari penyalahgunaan keuangan negara. Tetapi yang kami dapatkan data saat ini, setidaknya ada 10 kepala daerah menjadi tersangka meskipun Pemda-nya mendapatkan opini WTP dari BPK. Saya berharap BPK akan lebih mampu mengembangkan sistem pengendalian internalnya agar pemberian WTP benar-benar cerminan praktik akuntabilitas keuangan KL dan Pemda. Sekaligus mengembangkan sistem audit yang lebih luas daya jangkauannya.

Jadi ada beberapa target Pak, dari BPK ini yang saya ingin juga mengetahui seperti misalnya Indek Efektifitas Pengawasan mencapai skala 3,8. Pencapaian opini WTP atas laporan keuangan KL mencapai 95% dari angka base line yang 2014 sebesar 74 dan lain sebagainya. Itu kan target itu Bapak tahu ya, itu tolong sampaikan kepada kami apakah sudah tercapai apa belum.

Untuk BPKP, penggunaan e-procurement mencapai 80% targetnya apakah ini sudah berhasil 80% e-procurement sebagai bentuk keterbukaan kepada publik. Terus pertumbuhan penyedia barang dan jasa Pemerintah yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Saat ini pertumbuhannya hanya sebesar 5% setiap tahun, sejak tahun 2016. Menurut saya kurang begitu effort, effort-nya harus lebih dibesarkan lagi. Nah, bagaimana realisasi saat ini dengan target pertumbuhan yang mencapai 5% setiap tahunnya, meskipun saya lihat effort-nya masih belum begitu tinggi.

Itu saja Pimpinan, catatan dari kami.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas pendalaman dari pertanyaan.

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Ijin Pimpinan, maaf saya melengkapi tadi biar jelas saja.

Bapak dari BPKP tadi ini dialokasikan dana 194.411 ini belanja modal ya Pak. penyelesaian pembangunan Gedung kantor perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat. Bapak buka di halaman berapa itu? 12. Pembangunan Gedung kantor perwakilan BPKP Bangka Belitung, pembangunan tahap pertama Gedung kantor perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dan Maluku Utara. Masa Kalimantan Tengah sampai saat ini belum ada kantor BPKP, kalau Bapak sebut disini Kalimantan Utara mungkin agak masuk akal sedikit karena provinsi baru. Jadi saya mempertegas artinya mata saya belum kabur Pak, saya tidak salah sebut, penglihatannya masih baik.

Baik, bapak dari LKPP ada minta penambahan kurang lebih 116 miliar untuk 3 kegiatan. Kegiatan yang terakhir atau nomor 4 ini 54,5 miliar peremajaan infrastruktur sistem untuk internal maupun eksternal. Pertanyaan, ini infrastruktur berupa apa Pak?

KEPALA LKPP:

Berupa sistem dan berupa server dan pengembangan sistem pengadaan secara elektronik Pak.

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Ini Pak, kalau infrastruktur ini dalam bentuk aktiva tetap kenapa peremajaan lagi. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ada pasal ini aset ini sudah mencapai nilai residu dan bisa dihapus saja. Bapak lihat nanti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ini saran saja Pak.

Bapak Menteri Bappenas, tadi malam saya mengikuti secara cermat sampai selesai Bapak di televisi saya apresiasi dan luar biasa pagi tadi saya sudah mendapat paper dari Bapak Prof ini luar biasa. Bapak dengan mengambil contoh perpindahan ibu kota Brasil. Dari Rio Jeneiro ke Brasilia, ini dari sisi positifnya saya bisa memahami disini. Dan kesimpulan dari pemindahan ibu kota ini output multiplayer-nya 2,3 sementara employment multi player 2,9 cukup positif.

Saya sedikit ingin mendapatkan gambaran dari Bapak Menteri, sebab ini nanti kalau ditanya publik ini Komisi XI DPR RI bermitra dengan Bappenas. Jadi jangan sampai kami jawab, tetapi lidah kami terputar, bisa celaka Pak. Artinya, jawabnya

yang sesuai karena ini yang paling bertanggungjawab ini Menteri PPN/Kepala Bappenas. Kalau terjadi pemindahan Ibu Kota, bagaimana dengan aset Gedung kantor yang begini banyak di ibu kota yang lama, ini dibangun dari APBN tukar guling atau dijual. Nilainya sangat luar biasa Menteri Pak.

Kemudian Pak, kalau Pak Menteri atau Pemerintah mempergunakan skenario I itu dana yang dibutuhkan kurang lebih hampir 467 triliun atau pasnya 466 triliun. Akan tetapi kalau Bapak mempergunakan skenario yang kedua, masih lebih dari itu atau 323 triliun. Di sini Pak, dari skenario I, II, pertanyaan saya adalah berapa persen skema pembiayaan ini dibebankan dari APBN Pak, memang sedikit Pak.

Kemudian dibiayai dari APBN juga dengan sistem multi years proyek. Bapak estimasi kira-kira multi years ini apakah sampai dengan semua Gedung Ibu Kota yang baru ini fungsional atau estimasi multi years ini kira-kira berapa tahun. mudah-mudahan tidak sampai dengan seluruh infrastruktur itu fungsional. Jadi multi years inikan pengertiannya adalah pembayaran yang lebih dari 1 tahun.

Pembiayaan yang bersumber dari APBN dilakukan secara multi years dan tidak mengganggu program prioritas nasional. Ini mesti nanti Bapak memberikan gambaran tapi tidak harus sekarang, tapi kira-kira begitu Pak, karena ini pro dan kontra yang ikuti ini Pak, semakin menggebu-gebu. Jadi sebagai wakil rakyat paling tidak kalau ditanya ini Bappenas inikan mitra dari Komisi XI DPR RI, kita harus jawab paling tidak bisa mereka ada gambaran ya.

Yang paling gencar sekarang inikan kita ikuti Bapak Emil Salim Pak, ini sekarang lagi gencar-gencar tidak sependapat dengan kebijakan ini. Bahwa masalah bangsa yang paling penting dan mendesak tetapi kok berkonsentrasi kepada masalah yang belum penting dan belum mendesak.

KETUA RAPAT:

Dipersingkat Bapak Achmad Hatari.

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Sedikit lagi Pak, kami sebagai wakil rakyat kalau kita mengikuti ini bukan kita politisasi, tapi ini ada dinamika politik yang terjadi saat ini Pak, sudah dimana-mana. Maaf, karena saya $\frac{3}{4}$ dari umur ini ada yang sekarang bergejolak, dimana-mana sekarang sudah Pak, sudah merambat kemana-mana. Ini yang menurut para pakar, para tokoh agama dan lain-lain ini penting dan mendesak. Jadi kita harus *counter* itu sesuai dengan yang kami dapat dari Menteri Bappenas.

Hari ini semakin bias lagi kemana-mana karena saya merasa berkepentingan mengikuti setiap gerakan-gerakan. Jadi penyelesaian Pemerintah ini sifatnya temporer saja. Jadi kalau bayi yang masih di dalam janin itu bisa berbicara dan ketika mereka tanya, dia bisa berbicara, apa ikut NKRI atau referendum. Pasti dia akan jawab referendum, ini menjadi tanggungjawab bangsa bagaimana mengeliminir ini.

Saya kalau baca koran hatam dengan mereka ini, dan saya paham betul Pak. Jadi penyelesaian ini sifatnya temporer saja, nanti tenggelam muncul lagi, nanti tenggelam muncul lagi, dan sekarang kalau kita ikuti sudah seluruh dunia menyoroti soal yang satu ini. Tapi saya baca ini bagus sekali, jadi memberikan pemahaman.

Yang berikutnya BPKP, maaf ini terakhir karena kita harus komitmen. Komitmen itu mahal, Bapak bersua disinggung disini saya jadi menghingat pada waktu Rapat Kerja dengan BPKP pada tanggal 19 Juli 2019. Kesimpulan politik Komisi XI DPR RI pada waktu itu bahwa kita bisa menambah 1 triliun 60 juta untuk penyelesaian kurang lebih 50 ribu sekian tindaklanjut yang stagnan. Tadi saya hitung lagi disini Pak, kalau ini semua ditindaklanjuti dan bisa dikembalikan tidak sebanding dengan keinginan kita untuk menambah permintaan mereka. Jadi kita sudah terlanjur kesimpulan politik BPK, sudah singgung disini lagi. Jadi saya baca lebih lengkap dan tadi berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat antara BPK dengan Komisi XI DPR RI pada tanggal yang tadi saya sebut disepakati usulan pagu anggaran BPK tahun 2020 adalah itu tadi untuk penyelesaian sekian puluh ribu tindaklanjut yang stagnan.

KETUA RAPAT:

Cukup Prof?

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Cukup.

KETUA RAPAT:

Silakan Bapak Heri.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan kawan-kawan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,
Bapak dan Ibu Mitra Komisi XI DPR RI.**

Saya kali ini tidak membahas terkait dengan anggaran, mungkin saya sekedar fokus terhadap Bapak Bambang selaku Menteri Bappenas. Terkait dengan masalah pemindahan Ibu Kota ini sedang in Pak. Tentunya dari Fraksi kami secara resmi kami tidak terlalu bermasalah, karena pada prinsipnya pemindahan ibu kota itu sudah masuk dalam program partai kami pada saat 2014 lalu kita melakukan atau berkompetisi.

Jikalau mungkin ada data dari Bappenas bisa bantu di-share di tempat kami, kepada teman-teman Komisi XI DPR RI agar kalau ada media ataupun kawan-

kawan yang bertanya kami bisa membantu turut mensosialisasikannya, sehingga tidak menjadi rancu. Akhirnya karena draft-nya pun kita belum peroleh, ini berkembang kemana-mana.

Nah, seperti tadi yang mungkin diberikan kepada Bapak Jhonny Plate itu bisa kita jadikan bahan untuk kita bicara di media, seperti itu mungkin Pak. itu harapan saya mungkin Pimpinan, saya berharap meminta kepada Menteri Bappenas agar ini bisa di-share minimal kepada Komisi XI DPR RI yang menjadi mitra dari Bappenas untuk menjadi pembicara dari Bappenas agar ini bisa lebih *smoot* berjalannya.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Saya kira terima kasih Pak, ini waktu kita tadi jam 22.00 WIB ada 30 menit, nanti kalau tidak cukup waktu terpaksa kita tutup tidak mengambil kesimpulan, karena memang kita diberikan waktu sampai tanggal 5. Jadi hanya kesimpulan dan mungkin pertanyaan nanti singkat-singkat saja jawabannya Pak, yang penting kita jawaban tertulis dan kemudian kita putuskan mungkin tanggal 4 malam, jam 19.00 WIB kita putuskan, kita ketok.

Karena kita masih ingin mendengarkan tentang rencana Ibu Kota Negara yang baru itu juga masih lama, kan harus ada Rancangan Undang-Undang yang dipastikan DPR RI tentang Ibu Kota Negara. Belum lagi mencabut Undang-Undang yang lama, Undang-Undang DKI Jakarta Nomot 29 Tahun 2007. Proses ini dulu ini, kalau ini belum ada kita ini selama ini Cuma bicara ramai-ramai saja, tapi kalau kita bicara tidak bisa Presiden mengambil keputusan sendiri, tentunya harus dibahas dengan DPR RI, karena menyangkut masalah Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara.

Jadi saya kira sementara ini kita ademin dululah, kita bicara konsen yang ada di depan mata kita.

F-P. GERINDRA (Ir. H. HAERUL SALEH, S.H.):

Pimpinan, tambahan sedikit.

Terkait dengan yang disampaikan tadi oleh Ketua Sidang, kami setuju bahwa memang prosesnya masih panjang, akan tetapi proses ini pasti ada konsekuensi anggaran. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi fokus kami disini adalah bagaimana supaya kita mengefisienkan anggaran kita mengingat kita ini, kita tahu sendiri target penerimaan kita ini masih terlampau jauh dari realisasi. Dan artinya, kita masih punya banyak kekurangan, maka oleh karena itu kita mengharapkan agar Pemerintah betul-betul mengkaji dengan bijaksana tentang rencana pemindahan ibu kota ini. Dan pada saat mengkaji ini ada konsekuensi biaya, survey-survey yang dilakukan oleh semua kementerian-kementerian, lingkup Menteri ini konsekuensinya adalah anggaran yang cukup besar, sehingga ini sebenarnya yang mau kita cegah.

Kita sadar, kita mengerti bahwa ini tidak mungkin sekaligus pindah, tetapi konsekuensi yang inilah yang sebetulnya kita hindari. Belum lagi yang efek-efek

sosial itu yang akibat publisitas yang besar-besaran ini membuat juga reaksi atau respon masyarakat juga terlalu berlebihan terhadap rencana pemindahan ibu kota. Oleh karena itu, kembali sekali lagi kami ingin agar Pemerintah lebih bijaksana dan peran dari Bappenas ini sangat penting dalam memberikan kajian-kajian yang objektif terhadap rencana besar atau gagasan yang besar yang cukup menarik dan memang dibutuhkan oleh negara, tetapi mohon maaf mungkin kondisinya belum memungkinkan untuk dilaksanakan.

Contoh saja, yang mungkin kita perlu kaji sedikit saja, kaji sejarah saja misalnya. Sejarahnya dulu disana ada kerajaan besar lalu kemudian punah, ini jangan disepelekan pasti ada sebabnya. Ini juga berbahaya jangan sampai negara kita juga nanti punah, belum lagi ibu kotanya. Kalau kita tahu Jakarta ini Jabodetabek itu jelas, kalau disana sambel terong pedas lucu juga kan. Jadi kayak beginian ini, ini guyon akan tetapi sebetulnya dari beberapa aspek mungkin kita perlu mengkaji dan tidak perlu kaji yang lebih sampai jauh. Kita yang dari sini saja kita bisa membuka internet, kita lihat sejarah dan sebagainya, geografisnya itu kita sudah bisa membuat sebuah kesimpulan sederhana sesuai dengan anggaran Bappenas. Karena kalau anggarannya hanya segitu ya paling hasil kajian kita itu hanya akan melahirkan sebuah kajian yang hasil amatan permukaan saja, tidak bisa melahirkan kajian yang begitu detail dan bisa efektif.

Oleh karena itu, sekali lagi Kementerian Bappenas kami harapkan untuk bisa mengambil sikap dan memanfaatkan analisis-analisis para ilmuwan. Percuma botak kalau misalnya hasil analisa kita tidak dipakai, percuma sekolah maksud saya begitu Pak, percuma kita bekerja dan sekalian saja tidak usah kalau hanya untuk mendukung saja tapi tidak menjadi bahan utama dalam melaksanakan sebuah kebijakan.

Saya kira itu Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Kami persilakan Pak, dijawab masing-masing mitra akan kita berikan waktu 4 menit. Kami persilakan Pak, maksimal 4 menit.

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS (BAMBANG BRODJONEGORO):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Garis besarnya kalau mengenai anggaran yang diajukan kami 1,8 sekian triliun itu pada intinya kami menganggap itu cukup seperti pembicaraan pendahuluan. Jadi memang tidak perlu ada usulan penambahan untuk Bappenas dan itu sudah mencakup kajian atau persiapan mengenai pemindahan ibu kota di dalam 1,8 triliun tersebut. Dimana kita akan fokus untuk 2020, yaitu penyusunan master plan. Sedangkan kajian yang disampaikan itu sudah dilakukan sejak tahun 2017, jadi sudah memakai anggaran 3 tahun, dari 2017, 2018 maupun 2019.

Dan kami sangat memahami tentunya kami harus menjaga marwah dari perencanaan pembangunan secara umum, termasuk Ibu kota ini sehingga salah satunya adalah kita memastikan skema pembiayaan yang meminimalkan APBN. Dan itupun sumber APBN tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Hatari itu akan bersumber dari kerja sama pemanfaatan aset, baik yang ada di Jakarta maupun nanti yang ada di wilayah Ibu Kota baru.

Kemudian menyambung tadi dari Bapak Amirul, pada intinya dalam kajian yang kami sudah melakukan banyak kajian, evaluasi. Salah satu Deputi kami adalah khusus Deputi Evaluasi. Dan mereka selalu melakukan evaluasi terhadap beberapa program pembangunan, contohnya pembagian Alsintan di Kementan. Kementerian Pertanian pun kami evaluasi dengan teliti apakah memang sesuai dengan yang dibutuhkan, apakah misalkan jumlahnya memang sesuai dengan produktifitas yang dihasilkan. Jadi semuanya kami evaluasi untuk memastikan ke depannya apakah program ini perlu diteruskan atau kalau di teruskan mungkin di perbaiki skemanya atau di teruskan bahkan di perluas.

Nah, itukan menjadi bahan dari perencanaan ke depan. Jadi kajian sebenarnya cukup banyak dilakukan dan kalau soal mutu itu bisa dijamin, kami punya staf perencanaan yang kompeten, fungsional perencana yang selalu melakukan kajian secara akademik, empirik, dan melihat dampak terhadap pembangunan.

Nah, terakhir mengenai tadi pertanyaan mengenai model pengembangan talenta. Ini kita kerja sama dengan KSP, KSP itu nanti lebih banyak kepada talenta non ASN, sedangkan kami fokus kepada talenta yang ASN. Karena ASN sendiri pun kita masih melihat masih banyak *miss match*, artinya apa yang dibutuhkan ASN di suatu daerah ternyata kompetensinya tidak dimiliki oleh ASN tersebut. Dan itu nantinya terkait dengan penguatan perencanaan daerah yang pelatihannya dalam bentuk pelatihan fungsional.

Betul sekali, banyak yang dari fungsional perencana sudah dilatih sampai tingkat yang paling tinggi, tapi di daerah memang kita tidak bisa kontrol ketika kepala daerahnya memutuskan dia tidak di Bapeda lagi dan pindah ke dinas lain dan yang Kepala Bapeda belum tentu punya fungsional perencana. Tugas kami adalah memastikan bahwa yang bertugas di Perencanaan Daerah itu sudah terlatih dalam fungsional perencanaan tersebut.

Mungkin demikian Bapak Ketua, mudah-mudahan tidak lewat dari 4 menit.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Menteri.
Kami persilakan dari BPK.

SETJEN BPK RI:

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Terkait pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI. Ijinkan kami menjawab yang pertama terkait dengan pertanyaan Bapak Hatari terkait dengan rekomendasi tidak bisa ditindaklanjuti 1%-2% yang hampir nilainya Rp17 triliun. Memang jumlahnya kalau dari triliun jumlahnya besar Pak.

Ada beberapa alasan kenapa, karena dimungkinkan ada 100 tindaklanjut yang kemudian kita nyatakan tidak bisa ditindaklanjuti karena alasan yang sah, ada kriterianya. Jadi yang pertama karena *force major*, *force major* itu bisa kebakaran, objek yang menjadi rekomendasi itu ada terganggu karena adanya kebakaran, ada gangguan lain sehingga rusak, kemudian bencana alam, dan sebagainya.

Kemudian yang kedua, subjek atau objek rekomendasi ini dalam proses pengadilan. Ini juga akan menimbulkan bahwa nantinya segala putusan di pengadilan ini tentunya kalau sudah diputuskan otomatis, rekomendasi BPK sudah tidak bisa ditindaklanjuti karena semuanya sudah inkrah di pengadilan. Itu menyangkut nilainya juga karena terkadang putusan pengadilan jauh lebih rendah daripada yang dihitung berdasarkan rekomendasi BPK.

Kemudian alasan yang lain lagi adalah karena adanya perubahan organisasi atau perubahan aturan. Perubahan organisasi misalnya organisasi yang sebagai subjek untuk menindaklanjutinya sudah tidak ada, sehingga tidak ada organisasi lagi harus menindaklanjuti, misalnya kayak BRL Aceh.

Kemudian sebenarnya kalau masalah tindaklanjut ini, BPK juga sangat konsen bahkan kami sudah berusaha untuk mengefisienkan proses tindaklanjut, karena kita patuh betul dan bahkan kami siapkan namanya sistem formasi pemantauan tindaklanjut. Yang mana si wajib penindaklanjut ini bisa meng-upload semua dokumen tindaklanjutnya tanpa harus datang ke BPK, dari kantornya baru prosesnya, komunikasinya lewat sistem informasi ini. Ini sekarang kita kembangkan, sampai dashboard-nya saja dashboard entitas kita pilah sampai ke entitas yang benar-benar sebagai penanggungjawab di bawah koordinasi inspektorat. Ini sekarang sudah versi II dan harapannya ke depan tentunya akan mempercepat karena lebih efisien. Di Maluku Utara banyak pulau-pulau, Pemda di pulau-pulau tidak harus datang ke pulau yang paling besar dimana BPK ada, tapi cukup yang penting ada connecting internet bisa submit upload tindaklanjut yang ada.

Kemudian terkait dengan ada indikasi ataupun opini menyangkut pikiran dasar BPK, tadi integritas, professional, kemudian independent. Ada diperjual belikan kalau saya baca di dalam ininya. Kami ada MKKN yang memang setiap pengaduan selalu ditindaklanjuti secara proper. Dan bagi yang memang melanggar 3 nilai dasar itu, integritas, independensi dan profesionalisme selalu kena sanksi di MK.

Kemudian untuk selanjutnya Bapak Amirul Tamim dan Bapak Ecky, terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan ini, malam ini kami sungguh berbahagia karena ada Bapak Menteri Bappenas, dengan dukungan penambahan anggaran ini mudah-mudahan Bapak Menteri tinggal instruksi ke bawah bahwa ini sudah oke, sehingga mempermudah kami, karena yang bawah yang agak repot, Bapak Menteri baik. Malam ini berbahagia karena Bapak Menteri bisa dengar sendiri bagaimana kami bisa mempertahankan ini.

Kemudian Bapak Haerul Saleh, terkait dengan optimalisasi pemanfaatan anggaran. Jadi dalam proses penyusunan anggaran sendiri, kami ini selalu berusaha untuk ...(suara tidak jelas) Anggaran program, kegiatan berdasarkan fungsi unit kerja, jadi *money follow function*. Kemudian alokasi anggaran ini berorientasi kepada kinerja berhasil. Terus kemudian yang terakhir adalah fleksibilitas di dalam mengelola anggaran. Kalau semuanya sudah dilaksanakan pada saat tertentu kita melakukan evaluasi masih ada sisa anggaran, target output sudah tercapai sehingga kami bisa mengalokasikan ataupun menambah output misalnya menambah pemeriksaan entitas tertentu.

F-P. GERINDRA (HAERUL SALEH, S.H.):

Ijin Pak, optimalisasi yang dimaksudkan yang di situ ada konsekuensi biayanya. Nah, apa maksudnya itu Pak, ada anggaran berapa miliar itu yang dihabiskan untuk membiayai optimalisasi pemanfaatan anggaran itu.

SETJEN BPK RI:

Artinya, kalau semua target outputnya sudah tercapai, kemudian dari sisi waktu dan sumber daya kita masih memungkinkan ada anggaran, ada *urgency* untuk memeriksa suatu objek tertentu karena ada isu-isu signifikan yang berkembang, kami bisa melakukan pemeriksaan dengan hasil tadi yang setelah semuanya tercapai outputnya. Tidak mungkin kita mengorbankan suatu kegiatan yang belum tercapai outputnya untuk membiayai kegiatan yang lain, kecuali memang sama-sama dalam konteks outputnya LHP yang sama ataupun outputnya LHP.

Kemudian Ibu Indah, Ibu Indah mempertanyakan terkait dengan indeks opini. Ini memang ada beda, kalau yang di Pemerintah di RPJMN ini menggunakan indeks opini. Indeks opini ini sebenarnya kalau hitungannya WTP itu 4, WDP 3, terus kemudian ...(suara tidak jelas) 1, dan disclaimer 0, sehingga maksimal adalah 4 kalau semunya WTP. Nah, dalam kontes Pemerintah Pusat targetnya adalah di dalam RPJMN 2015-2019 targetnya adalah 3,88 sehingga capaian tahun sekarang pun yang sudah mencapai 3,93 ini sudah di atas target RPJMN.

Kemudian untuk yang kabupaten/kota ini juga demikian, bahwa di dalam RPJMN 2015-2019 masing-masing ditetapkan itu per jenis Pemerintah Provinsi itu 85%, untuk kabupaten 60%, kota 65%. Capaian sekarang untuk provinsi sendiri sudah mencapai 94% untuk tahun 2019 atas laporan keuangan 2018. Terus kemudian Pemerintah Daerah dari 415 Pemerintah Kabupaten 327 sudah WTP, sehingga 79%, target di RPJMN 60%. Kemudian yang untuk kota dari 93 Pemerintah Kota itu 84 sudah, artinya 90% sedangkan target di 2019 hanya 65.

Demikian Pimpinan dan Bapak, Ibu Anggota Dewan.

KETUA RAPAT:

Silakan dari BPKP.

KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN:

Terima kasih Pak, atas kesempatannya.

Yang pertama, kami ingin menanggapi dan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Hatari tadi terkait dengan keuangan desa dan masalah SPP dan target-target lainnya yang masih rendah khususnya di Papua dan Kalimantan. Memang terlepas dari masalah lokasi, kondisi yang membuat sarana dan prasarana mengalami kesulitan. Memang komitmen Pimpinan itu sangat dibutuhkan dan kami terus berupaya untuk mendapatkan komitmen dari Pemerintah Daerah setempat.

Terkait dengan target non fiskal yang masih rendah, ini berkaitan dengan pemeriksaan pajak dan pemeriksaan PNBPNP di bidang Minerba. Dan ini bekerja sama dengan dari pihak pajak maupun dari Kementerian ESDM dan mereka yang ...(suara tidak jelas) Surat tugasnya dan koordinasi ini memang memerlukan *effort* juga. Dan sekarang baru dimulai bulan Agustus ini Pak, pemeriksaannya. Dan kami harapkan realisasinya bisa mencapai apa yang diharapkan.

Kemudian masalah anggaran untuk pembangunan Gedung kantor di Maluku Utara, di Kalimantan Tengah. Di Maluku Utara di Ternate, memang sudah ada kantornya Pak, luasnya sekitar 800-an meter per segi dan diharapkan anggaran yang di dapat untuk tahun 2020 itu untuk pembangunan kantor yang lebih layak di Sofifi. Sedangkan di Kalimantan Tengah itu kantor itu sudah ada bekas mess Kantor Penghubung dulunya Pak, sehingga baru sekarang mudah-mudahan bisa disetujui anggarannya untuk pembangunan tahap pertama.

Kemudian berkaitan dengan dana desa. Kami sangat senang sekali kalau memang dari Bapak ini bisa merekomendasikan apa yang menjadi karya BPKP terkait dengan sistem keuangan ini maupun dana desa bisa dilakukan suatu kewajiban untuk diterapkan untuk di Pemerintah Daerah. Banyak hal yang menjadi keputusan di luar kewenangan dari BPKP sendiri. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan dukungan dari Komisi XI DPR RI ini. Mudah-mudahan apa yang kami harapkan dari pengajuan ini dapat dukungannya.

Demikian Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan dari LKPP.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH:

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Pertama-tama kami mohon maaf atas paparan yang mungkin kurang berkenan, tetapi kami menyampaikannya dengan serius. Kalau memang ada ular-

ularnya itu tadi memang kami berharap WDP turun terus menjadi WTP kok ternyata WDP-nya kebablasan ikut turun lagi harusnya naik lagi. Kemudian yang terkait dengan paparan, capaian, tadi adalah capaian semuanya di tahun 2018. Dan saya sudah berkomunikasi dengan Bapak Ecky langsung.

Pertanyaan dari Ibu Indah, e-proc ini saat ini memang targetnya 80% di dalam laporan kami memang baru mencapai 39,6. Harapan kami dengan menggunakan SBSE versi 43 tadinya 3,6 sekarang sudah 43 mengharuskan yang pengadaan pemilihan langsung harus masuk dalam sistem *procurement*. Kalau yang kami paparkan tadi 1.050 itu melalui proses tender biasa dan melalui proyek Sehingga yang PL pemilihan pengadaan langsung banyak yang tidak ter-cover dari 1.040 triliun anggaran APBN yang memerlukan pengadaan.

Terkait dengan pertumbuhan 5% terhadap penyedia tahun 2016 sudah mencapai 7%, 2017 sebesar 7,96% dan di 2018 *alhamdulillah* sudah mencapai 11,74%.

Bapak Hatari, terima kasih atas masukannya di peremajaan memang pertama LKPP berdiri masih banyak versinya yang harus kami perbaiki, kami pun baru pindah ke Cibitung dan server itu menjadi model utama, karena kami ingin tersentralisasi kembali, banyak SBSE kami yang kami serahkan di daerah. Dan saat ini kami sudah menangani, hari Jumat besok kami koordinasi dengan salah satu aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa tidak ada lagi pembobolan terhadap aplikasi yang ada.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Dan sekali lagi terima kasih atas dukungan apabila memang mendapatkan anggaran tambahan 116, sehingga tidak turun juga, jadi naik.

Terima kasih Ibu Indah.

KETUA RAPAT:

Silakan dari BPS.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK:

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Yang pertama, dari Bapak Hatari. Saya sangat setuju Bapak Hatari, kalau kualitas SDM kita yang bekerja dalam tanda petik mengkhawatirkan, karena jumlah pekerja yang di bawah SD itu mencapai 40,51%. Tetapi kalau dilihat perubahan dari tahun-tahun sebelumnya ada progress, karena itu saya sangat setuju kalau Pemerintah sekarang menekankan pada pendidikan vokasi.

Kemudian untuk Bapak Haerul, berapa jumlah variable yang dikumpulkan di dalam Sensus Penduduk 2020. Sensus itu nanti akan kita bagi dalam dua tahap Bapak, di tahap pertama itu nanti komplit di sana ada 19 pertanyaan, 10 pertanyaan individu, dan 10 pertanyaan individu nanti ada yang menarik karena dari sana kita akan menanyakan tempat tinggal menurut KTP dan tempat tinggal yang sekarang,

sehingga kita mempunyai jumlah penduduk de facto dan de jure. Ada 3 pertanyaan mengenai pekerjaan, dan ada 5 pertanyaan mengenai perumahan.

Tetapi nanti di tahap kedua, itu nanti akan ada 82 pertanyaan yang kita telusuri detail, baik mengenai migrasi, pendidikan, kesehatan, perumahan dan ketenagakerjaan. Dengan harapan dari data inilah nanti yang akan digunakan di tempatnya Bapak Bambang dan *stakeholder* lain untuk membuat perencanaan yang detail di berbagai bidang. Nanti kalau diperlukan daftar pertanyaannya kita bisa kirimkan.

Kemudian Bapak Haerul Saleh, Sensus Penduduk terakhir itu adalah 2010, jadi memang 10 tahun terakhir. Kreativitas terobosan teknologinya seperti yang saya sampaikan kita akan mengajak masyarakat untuk melakukan Sensus Penduduk online. Kalau partisipasi masyarakat semakin tinggi tentu tahun-tahun ke depan biaya Sensus Penduduk akan semakin mengecil.

Kemudian untuk Ibu Indah, betul Ibu Indah, bahwa itu yang di-upload di BPS terakhir adalah tahun 2017 tetapi laporan kinerja yang 2018 sudah ada. Jadi Itu hanya diperbaiki ketika kita memperbaiki Renstra untuk melihat laporan kinerja BPS ada namanya laporan kinerja dan itu sudah tahap terakhir 2018 yang ada disana.

Mengenai jumlah pengunjung website di sebelah web BPS di informasi publik di sana, ada laporan berkala dan di sana bisa dilihat statistik penggunaannya. Bisa diklik di sana bahwa misalnya kita bisa melihat jumlah pengunjung website BPS pada tahun 2018 bulanan dan totalnya adalah 2,3 juta. Dan di sana bisa di-*break down* minat dari pengunjung itu terhadap statistik apa yang ada. Kalau nanti memang diperlukan 2019 ini memang kita kumpulkan bulanan tetapi terakhir yang di-upload memang Desember 2018 nanti kita akan tambahkan bulanan 2019.

Demikian Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Karena waktu juga yang membatasi kita sampai dengan jam 22.00 WIB rapat kita tutup saja. Kemudian sebelum saya tutup tentunya saya mohon dari Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menyampaikan kata akhir.

Rapat ini akan kita tunda sampai dengan tanggal 4 September 2019 jam 19.00 WIB di tempat yang sama. Untuk tentunya kami mohon dari pihak mitra menjawab tertulis dari pertanyaan-pertanyaan Anggota yang diperlukan, kemudian kita akan mengambil kesimpulan pada rapat tersebut.

Terima kasih, kami persilakan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS:

Yang terhormat Bapak Pimpinan serta Ibu dan Bapak Anggota Komisi XI DPR RI.

Kami atas nama Bappenas, BPK, BPKP, LKPP dan BPS mengucapkan terima kasih atas rapat yang kita selenggarakan pada malam hari ini. Dan semua sudah disampaikan dan tentunya seperti disampaikan oleh pertama BPK, BPKP, LKPP barangkali aspirasinya bisa diperjuangkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Sedangkan kami dan BPS tetap pada posisi seperti yang diusulkan.

Pada intinya kami menghargai proses ini dan terima kasih atas segala dukungan dan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Dan sekali lagi terima kasih karena kita nanti akan segera mengambil keputusan di minggu depan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Menteri.

Dengan mengucap syukur *alhamdulillah*, rapat saya tutup.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 22.05 WIB)

Jakarta, 29 Agustus 2019

**a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat**

ttd

**Drs. Urip Soedjarwono
NIP. 19620521 198203 1 001**